



**PERANAN SOEKARNO DALAM MENGGALI HINGGA PENETAPAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA TAHUN 1945**

SKRIPSI

Oleh

**Satria Janisar
NIM 140210302043**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PERANAN SOEKARNO DALAM MENGGALI HINGGA PENETAPAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA TAHUN 1945**

SKRIPSI

diajukan sebagai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Satria Janisar
NIM 140210302043

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah (Alm). Bagus Adam dan Mama Marishi Cita Kartika, yang tanpa lelah telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang;
2. Kakakku Rafika Diah Ayumi, S.Sos., saudaraku yang menemani hari-hariku sejak kecil hingga kini;
3. Papa H. Totong Lukiyanto, S.E., dan Mama Hj. Yuristina, B.Sc., terima kasih atas perhatiannya selama ini;
4. Guru dan dosen sejak TK hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidikku menjadi insan yang lebih baik;
5. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTO

Jiwa Indonesia adalah jiwa gotong royong, jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan.
Kita telah merumuskan jiwa yang demikian itu dengan apa yang dinamakan
Pancasila. Hanya Pancasila yang sesuai dengan jiwa Indonesia.

Soekarno *)



*) <https://rosodaras.wordpress.com/tag/amanat-bung-karno/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Janisar

NIM : 140210302043

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 November 2018

Yang menyatakan,

Satria Janisar
NIM 140210302043

SKRIPSI

**PERANAN SOEKARNO DALAM MENGGALI HINGGA PENETAPAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA TAHUN 1945**

Oleh

Satria Janisar
NIM 140210302043

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Kayan Swastika, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945” telah disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 8 November 2018

tempat : Gedung I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto, M.Hum.
NIP 195702201985031003

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP 196702102002121002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP 196004221988021001

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
NIP 196006121987021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP 196808021993031004

RINGKASAN

Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945; Satria Janisar; 140210302043; 2018; xiv + 113 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara dalam sebuah pidato tanpa teks. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yaitu Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), Mufakat (Demokrasi), Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Kelima prinsip itu atas saran seorang teman Soekarno yang ahli bahasa dinamakan Pancasila. Menurut Soekarno Pancasila itu masih bisa diperas lagi menjadi Trisila yaitu Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (Nasionalisme) dengan Peri Kemanusiaan (Internasionalisme), Sosio Demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat (Demokrasi) dengan Kesejahteraan Sosial, serta Ketuhanan. Kemudian menurut Soekarno Trisila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong Soekarno mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau *Philosophische Grondslag* dan juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sering disebut sebagai *weltanschauung*. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan fokus kajian yang bertujuan untuk mencari jawaban mengenai: (1) bagaimana kondisi budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila, (2) bagaimana gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila, (3) bagaimana usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah (1) mengetahui kondisi budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila, (2) mengetahui gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila, (3) mengetahui usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Manfaatnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dan wacana pengetahuan bagi

masyarakat mengenai peranan Soekarno dalam menggali hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical method*) yang terdiri dari empat langkah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, dengan menggunakan teori peran dan pendekatan ideologi.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan *pertama*, kehidupan budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila berkembang pesat sebagai bagian adanya sinkretisasi budaya asli Indonesia dengan budaya-budaya pendatang. Hal ini tidak serta-merta menghilangkan budaya asli Indonesia, melainkan makin mempersubur dan memperkaya budaya asli yang berupa nilai-nilai luhur dan keahlian-keahlian yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai luhur ini pulalah yang di kemudian hari dirumuskan menjadi dasar negara Pancasila oleh Soekarno. Kesimpulan *kedua* mengenai gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila. Sejak zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Soekarno selalu konsisten dengan gagasannya. Hal itu yang menjadikan Pancasila Soekarno bisa diterima oleh semua golongan. Kesimpulan *ketiga* mengenai usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno dengan konsistensi gagasannya berusaha menggali Pancasila yang bersumber dari khasanah bangsa Indonesia. Soekarno juga dengan kapasitasnya baik sebagai ketua Panitia Sembilan maupun ketua PPKI berusaha untuk mempersatukan berbagai sudut pandang para tokoh bangsa hingga akhirnya Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah peneliti menyarankan kepada segenap masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang cocok diterapkan di Indonesia, karena sila-silanya dan nilai-nilainya bersumber dari khasanah bangsa Indonesia.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Mohammad Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Drs. Marjono, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji I;
6. Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota, dan Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku Dosen Penguji II;
7. dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
8. Ayah (Alm). Bagus Adam, Mama Marishi Cita Kartika, kakak Rafika Diah Ayumi, S.Sos., Papa H. Totong Lukiyanto, S.E., dan Mama Hj. Yuristina, B.Sc.;

9. teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2014;
10. teman-teman The Kost Prix 66: Albar Imam Aziz, Muhammad Ashadi, Mohammad Irfan, Ahmad Muzakky, Sulaiman, Muhardin, Agung Pranoto, dan Imam Tauqit;
11. sahabat-sahabatku: Romeo Holida Fasah, Khusnul Hotimah Abas, Yulia Agustin, Dewi Lestari, Ahmad Muhammad Muttafiq, dan Dwi Joni Rufiantoro;
12. dan masih banyak lagi yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

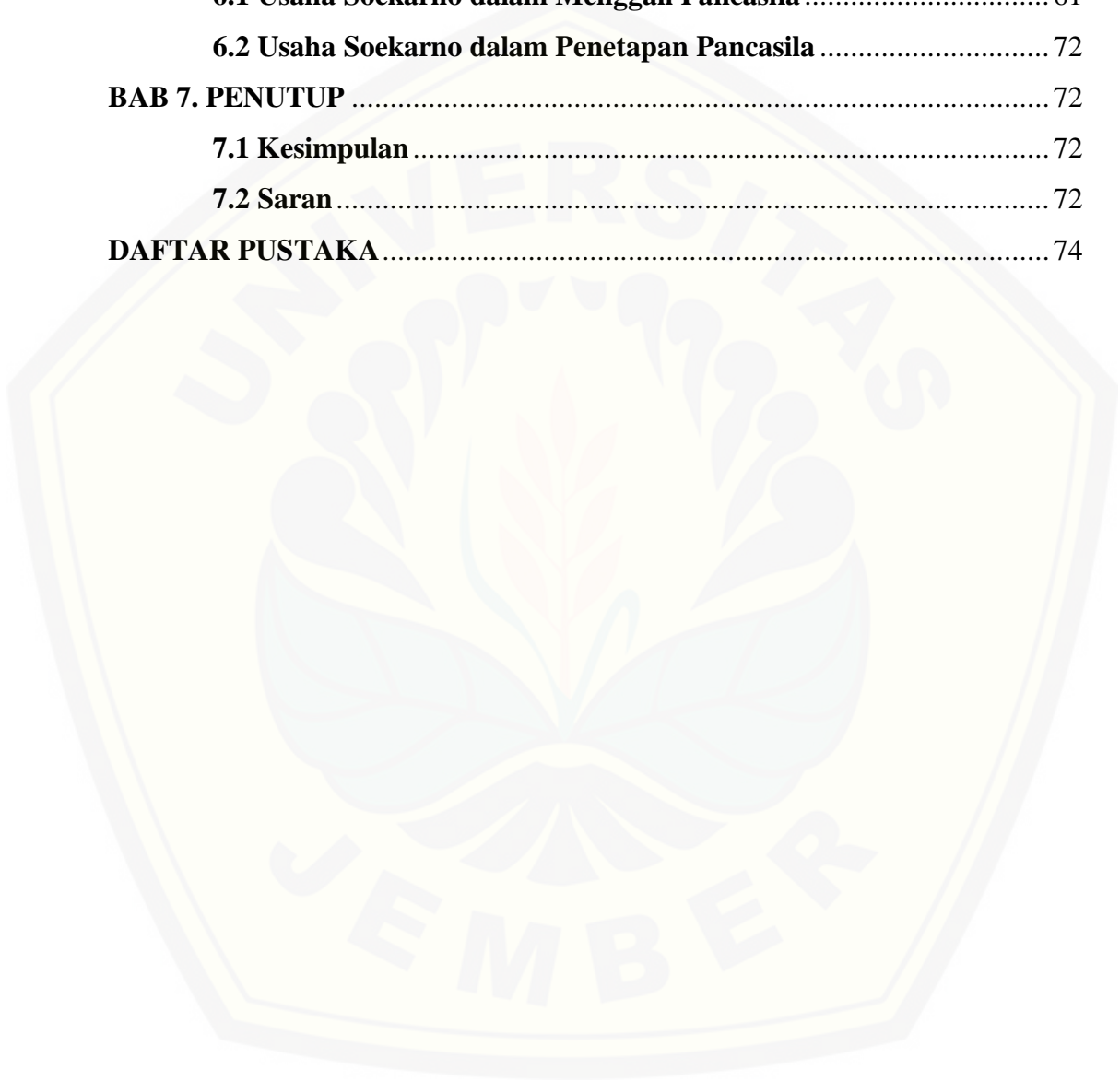
Jember, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan.....	7
1.6 Manfaat.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	14
BAB 4. KONDISI BUDAYA DAN RELIGI BANGSA INDONESIA	
SEBELUM LAHIRNYA PANCASILA.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Budaya Asli Indonesia	Error! Bookmark not defined.
4.2 Budaya-Budaya Pendetang yang Masuk ke Indonesia	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Budaya India (Hindu-Buddha)	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Budaya Islam.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Budaya Barat	Error! Bookmark not defined.

BAB 5. GAGASAN SOEKARNO YANG MENDASARI UNTUK MENGKALI PANCASILA	49
BAB 6. USAHA SOEKARNO DALAM MENGGALI DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	61
6.1 Usaha Soekarno dalam Menggali Pancasila	61
6.2 Usaha Soekarno dalam Penetapan Pancasila	72
BAB 7. PENUTUP	72
7.1 Kesimpulan	72
7.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN	78
LAMPIRAN B. SOEKARNO BERPIDATO 1 JUNI 1945	79
LAMPIRAN C. PIDATO LAHIRNYA PANCASILA	80
LAMPIRAN D. NASIONALISME, ISLAMISME, MARXISME	105
LAMPIRAN E. SURAT WASIAT MOHAMMAD HATTA KEPADA GUNTUR SOEKARNOPUTRA	106
LAMPIRAN F. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA	111

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup dan ideologi bangsa adalah nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak sebelum terbentuknya NKRI. Bangsa Indonesia telah berupaya untuk menggali dan merumuskan dasar negara yang disebut Pancasila, melalui diskusi-diskusi dalam waktu yang relatif lama.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia hidup dalam kebudayaan bangsa Indonesia, karena nilai-nilai luhur tersebut merupakan bagian kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Secara historis, budaya bangsa Indonesia telah terbentuk sejak zaman pra-sejarah dan makin berkembang dengan masuknya budaya-budaya pendatang seperti budaya Hindu-Buddha, Islam, dan Barat ke Indonesia (Koentjaraningrat, 2002:21-29). Interaksi budaya asli Indonesia dengan budaya-budaya pendatang tersebut menyebabkan munculnya kemajemukan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia.

Pancasila lahir dari sebuah proses sejarah yang panjang, oleh karena itulah Pancasila memiliki nilai historis bagi bangsa Indonesia. Nilai historis Pancasila timbul karena dalam perumusannya melalui serangkaian peristiwa sejarah yang mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya. Presiden Soekarno dalam amanatnya pada tanggal 24 September 1955 di Surabaya mengatakan,

“... Selamilah sedalam-dalamnya daripada sejarah! Gali sedalam-dalam bumi daripada sejarah! ... Aku menggali lima mutiara yang terbenam, tadinya lima mutiara itu cemerlang tetapi karena oleh penjajahan asing yang 350 tahun lamanya... aku gali kembali lima mutiara itu dan kupersembahkan di atas persada” (Pringgodigdo dalam Notosusanto, 1983:72).

Pada saat sidang pertama BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Laoly, 2017:3) pada 28 Mei 1945, Ketua BPUPK dr. KRT. Radjiman

Wedyodiningrat mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apakah dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka. Menanggapi hal itu, ada tiga orang tokoh yang mengajukan usulnya mengenai dasar negara: Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945). Sidang itu berlangsung di gedung Chuo Sangi-In (sekarang Gedung Pancasila yang masuk dalam kompleks Kementerian Dalam Negeri).

Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara dalam sebuah pidato tanpa teks. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yaitu Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), Mufakat (Demokrasi), Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Kelima prinsip itu atas saran seorang teman Soekarno yang ahli bahasa dinamakan Pancasila. Menurut Soekarno Pancasila itu masih bisa diperas lagi menjadi Trisila yaitu Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (Nasionalisme) dengan Peri Kemanusiaan (Internasionalisme), Sosio Demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat (Demokrasi) dengan Kesejahteraan Sosial, serta Ketuhanan. Kemudian menurut Soekarno Trisila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong (Kaelan, 2010:40).

Soekarno mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau *Philosophische Grondslag* dan juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sering disebut sebagai *weltanschauung*. Soekarno membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitanisme, San Min Chui, dan ideologi besar dunia lainnya (Sekretariat Negara, 1998:63-64).

Kemudian untuk menindaklanjuti usulan-usulan mengenai dasar negara itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, A.A. Maramis, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Abdul Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Agus Salim. Hasil dari dibentuknya Panitia Sembilan itu ialah Jakarta Charter (Piagam Jakarta), yang kelak menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

paragraf keempat dimuat rumusan dasar negara, yaitu Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun kemudian ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan akan dilaksanakan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Inkai*, perwakilan dari Indonesia Bagian Timur yang mayoritas Non Muslim, menemui Mohammad Hatta dan menyampaikan keberatannya akan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya. Perwakilan itu mengancam jika sila pertama itu tidak diubah, maka Indonesia Bagian Timur tidak mau bergabung dengan Indonesia. Hal itu kemudian disampaikan Mohammad Hatta kepada Soekarno selaku Ketua PPKI. Soekarno kemudian mengumpulkan perwakilan Muslim dan perwakilan Non Muslim guna membahas masalah ini. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa bunyi dari sila pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa (Laoly, 2017:8).

Soekarno sendiri sebenarnya telah jauh-jauh hari memikirkan tentang dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka. Saat masa pembuangan di Ende, Flores, suatu saat Soekarno duduk di bawah sebuah pohon Sukun. Tiba-tiba Soekarno mendapatkan ilham tentang dasar negara. Tapi Soekarno mengatakan bahwa ilhamnya di bawah pohon Sukun itu baru dapat dirumuskannya saat muncul pertanyaan dari dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1965, Soekarno mengatakan bahwa pada saat itu menggali daya pikirnya, daya ciptanya, dan daya khayalnya, untuk merumuskan sebuah dasar negara yang dinamakan Pancasila.

Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Soekarno adalah penggali Pancasila datang dari Mohammad Hatta. Hatta yang juga mantan anggota BPUPK dalam setiap kesempatan (hingga akhir hayatnya) menyatakan bahwa tanggal 1

Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila dan penggalinya adalah Soekarno. Hatta dalam surat wasiatnya (lihat lampiran E) kepada Guntur Soekarnoputra (Idayu, 1981:208-209) mengatakan, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan asal mula Pancasila yang sekarang (Pancasila dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945) dengan perubahan urutan dan redaksional yang dilakukan oleh Panitia Sembilan dan PPKI. Pendapat ini merupakan pendapat yang secara umum diterima oleh masyarakat sejak kata “Pancasila” diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Pendapat lainnya datang dari Nugroho Notosusanto. Nugroho berpendapat bahwa tanggal 18 Agustus 1945 adalah hari lahir Pancasila dan penggali Pancasila tidak hanya Soekarno saja, tetapi juga Yamin dan Soepomo. Pendapat ini didasarkan pada buku “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945” jilid 1 karya Yamin yang dijadikan sumber primer utama untuk menulis bukunya yang berjudul “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara”. Pada buku Yamin tersebut terdapat pidato Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, pidato tersebut memuat rumusan Pancasila yang mirip dengan rumusan Pancasila pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan pada buku tersebut juga terdapat pidato Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang juga diyakini Nugroho memuat usulan dasar negara. Pada akhirnya didapat kesimpulan bahwa Pancasila tidak dirumuskan oleh satu orang tetapi oleh tiga orang yakni Yamin, Soepomo, dan Soekarno (Notosusanto, 1983:24-28). Mengenai tanggal lahir Pancasila, Nugroho berpendapat bahwa tanggal 1 Juni 1945 bukan tanggal lahir Pancasila, yang lahir pada tanggal tersebut hanya istilah atau nama dari dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Tanggal lahir Pancasila yang sah dan otentik adalah tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia (termasuk di dalamnya Pancasila yang resmi), maka “Pancasila-Pancasila” sebelum tanggal 18 Agustus 1945 hanya merupakan konsep-konsep belaka (Notosusanto, 1983:97-98).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejarah Pancasila, khususnya peran Soekarno dalam Pancasila. Oleh

karena itu peneliti mengambil judul “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk menghindari adanya perbedaan pengertian persepsi dalam penelitian ini. Diharapkan dengan adanya kesamaan persepsi akan dapat membantu memahami penelitian ini. Judul yang dipilih oleh peneliti adalah *Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945*.

Menggali pada konteks ini hakikatnya adalah proses untuk menemukan sebuah konsep atau gagasan mengenai dasar negara Pancasila. Soekarno sejak pembuangan di Ende, Flores, telah memikirkan tentang dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka. Proses pemikiran itu dilakukannya sambil duduk di bawah sebuah pohon Sukun. Ketika zaman Jepang, tepatnya pada sidang BPUPK yang membahas tentang dasar negara, Soekarno teringat kembali akan proses pemikirannya ketika pembuangan di Ende. Maka pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menuangkan hasil pemikirannya itu dalam sebuah pidato yang berjudul *Lahirnja Pantja Sila*.

Penetapan pada hakikatnya adalah proses untuk menetapkan sesuatu yang telah diputuskan. Setelah sidang BPUPK yang membahas mengenai tentang dasar negara usai, kemudian dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk merumuskan kembali dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada 22 Juni 1945. Kemudian Pancasila secara sah ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sekarang juga sudah secara sah ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 (lihat lampiran D).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945 adalah proses pemikiran untuk menemukan sebuah

konsep atau gagasan mengenai dasar negara yang dilakukan oleh Soekarno hingga Pancasila secara sah ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia tahun 1945.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan penegasan pengertian judul, penulis membatasi ruang lingkup masalah yang ada baik dalam aspek tematikal, temporal, dan spasial. Penulis membatasi ruang lingkup tematikal penelitian ini pada proses perenungan yang dilakukan oleh Soekarno untuk menemukan konsep atau gagasan mengenai dasar negara hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini adalah sejak Soekarno bersekolah di Horgere Burger School (HBS) Surabaya hingga Pancasila secara sah ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Ruang lingkup spasial (tempat) pada penelitian ini adalah Surabaya, tempat Soekarno bersekolah HBS; Ende, tempat pembuangan Soekarno sekaligus tempat pertama kali Soekarno merenungkan tentang dasar Negara; dan Jakarta, yang merupakan tempat dilaksanakannya sidang-sidang BPUPK dan PPKI, lebih tepatnya gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon, Jakarta (sekarang bagian dari kompleks Kementerian Luar Negeri) untuk pelaksanaan sidang-sidang BPUPK, serta gedung Kebaktian Rakyat Jawa di Jalan Gambir Selatan, Jakarta, untuk sidang-sidang PPKI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana kondisi budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila?
2. bagaimana gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila?
3. bagaimana usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara?

1.5 Tujuan

Dalam menjalankan setiap kegiatan terutama yang berkaitan dengan penelitian, pasti memiliki tujuan di dalamnya. Hal ini bertujuan agar peneliti bisa melakukan kegiatan penelitian tanpa keluar dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. mengetahui kondisi budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila
2. mengetahui gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila
3. mengetahui pemikiran Soekarno dalam menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

1.6 Manfaat

Dalam penelitian ini yang berjudul “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang peranan Soekarno dalam menggali hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
2. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk para akademisi terkait dengan peran Soekarno dalam merumuskan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan peranan Soekarno dalam menggali hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
3. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Program Studi Pendidikan Sejarah yang berhubungan dengan peranan Soekarno dalam menggali hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara serta untuk memperluas wawasan kita terhadap pengetahuan tentang tema yang kita ambil dan kita teliti sebagai tugas akhir atau skripsi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945”. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Arinanto (1997) dalam tesisnya berjudul “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara: Studi tentang Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan tentang Polemik mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara”, membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta polemik sekitar hari lahir dan penggaliannya dari perspektif sejarah hukum tata negara. Pembahasan tersebut menghasilkan sebuah deskripsi proses perumusan Pancasila hingga menjadi dasar negara Republik Indonesia yang sah secara yuridis-konstitusional. Dalam tesis tersebut dijelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*), norma dasar negara (*staats fundamental norm*), dan cita-cita hukum (*rechtsidee*), tidak ada yang bisa menyangkalnya, karena semua itu adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Namun permasalahan muncul jika mengarah pada hari lahir dan penggali Pancasila. Permasalahan itu bisa dijawab melalui perspektif sejarah hukum tata negara yang membuktikan bahwa Soekarno adalah orang yang pertama kali mengutarakan dasar negara Pancasila dalam pidatonya pada sidang BPUPK yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945.

Santoso (2010) dalam skripsinya berjudul “Sejarah Lahirnya Pancasila”, membahas tentang proses perjalanan Pancasila hingga secara sah ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia. Dalam skripsi tersebut dikatakan bahwa penggali Pancasila adalah Soekarno. Hal ini didasarkan pada tiga fakta, yaitu kesaksian para pelaku sejarah (anggota BPUPK), persamaan prinsip atau ideologi dari sila-sila dalam rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dengan sila-sila

rumusan Pancasila yang sah, dan gugurnya pendapat Nugroho Notokusanto yang menyatakan bahwa Yamin dan Soepomo juga penggali Pancasila. Namun dalam skripsi ini tidak dibahas secara mendalam mengenai peran Soekarno dalam menggali Pancasila, karena fokus pada skripsi ini adalah tentang sejarah lahirnya Pancasila secara keseluruhan.

Basarah (2016) dalam disertasinya berjudul “Eksistensi Pancasila sebagai Tolak Ukur dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan” yang kemudian dibukukan dengan judul “Bung Karno, Islam, dan Pancasila” membahas tentang Hari Lahir Pancasila dan posisi dan kedudukan hukum Pancasila. Dalam disertasi itu dikatakan bahwa pertanyaan dari Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK yaitu tentang apa dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka, baru mendapatkan jawaban melalui pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato itu menguraikan lima prinsip dasar Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato untuk menjawab permintaan ketua BPUPK akan dasar negara (*philosophische grondslag*) atau pandangan dunia (*weltanschauung*) dengan penjelasannya yang runtut, solid, dan koheren. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia merdeka (Basarah, 2016:28). Dikatakan pula bahwa istilah Pancasila itu sendiri hanya dapat ditemui dalam pidato 1 Juni 1945 dan tidak ditemukan dalam naskah UUD 1945 sebelum perubahan atau naskah UUD 1945 setelah perubahan. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu juga telah diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPK. Selanjutnya dalam disertasi ini juga dijelaskan tentang prinsip-prinsip mengenai sila-sila yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Pertama prinsip Ketuhanan, yaitu Ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang, dan toleran, bukan Ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Kedua prinsip kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif.

Ketiga prinsip persatuan, yaitu mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan dalam Bhinneka Tunggal Ika, bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Keempat prinsip demokrasi, yaitu mengembangkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elite penguasa atau pemilik modal. Kelima prinsip keadilan, yaitu mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-liberalisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme* (Basarah, 2016:34).

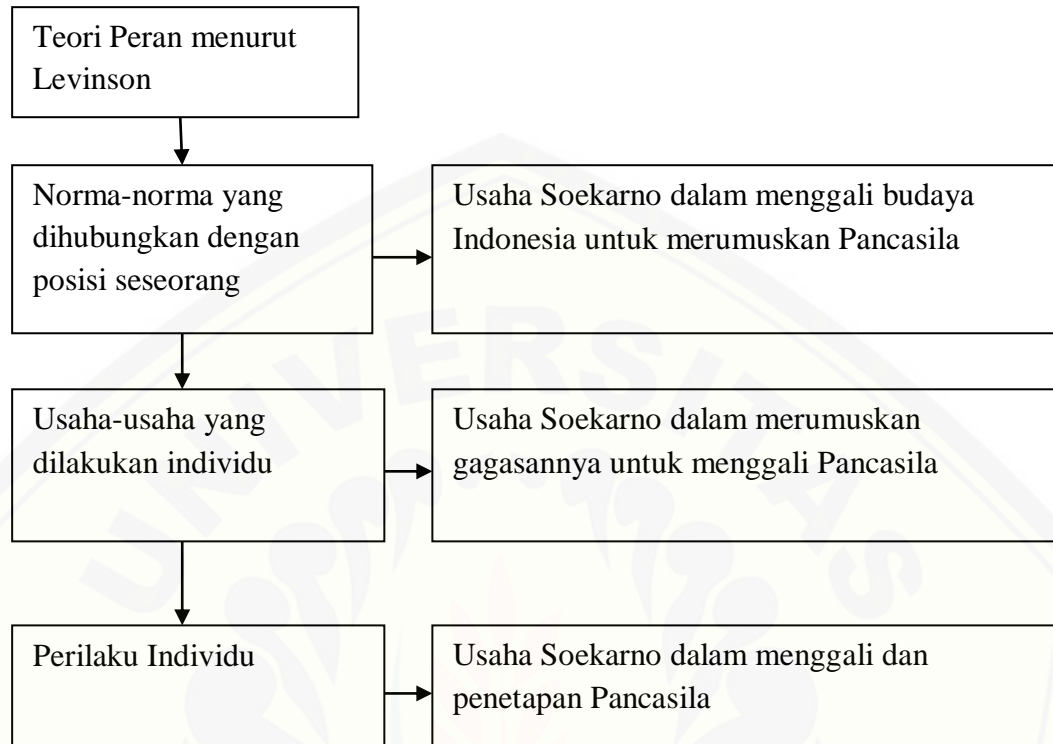
Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan suatu penelitian adalah jenis pendekatan yang digunakan. Menurut Kartodirdjo (1992:4) dalam menggambarkan suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan yaitu dari segi mana memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu konsep dari ilmu politik, yaitu konsep ideologi. Ideologi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran seseorang tentang nilai-nilai dasar, tujuan, dan cita-cita kehidupan sebuah kelompok atau masyarakat (Noer, 1983:43-46). Menurut Larrain (1996:2-3) ideologi lahir sebagai respon realita-obyektif yang terjadi di masyarakat. Seorang ideolog memerlukan waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan sebuah ideologi yang matang, karena ideologi lahir sejalan dengan kepercayaan-kepercayaan dan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam masyarakat, dengan demikian ideologi tidak lahir secara tiba-tiba. Konsekuensi ideologis bagi seorang ideolog adalah dia harus konsisten memegang dan menjalankan ideologinya dalam menghadapi segala permasalahan yang ada (Sukarna, 1981:1-5). Berhubungan dengan hal itu, menurut Abdulgani (1998:59-60), ideologi merupakan *a set of idea and ideas* (seperangkat idea atau ide-ide) yang dijadikan *point of view* (cara pandang) untuk menentukan kelompok “sana” dan kelompok “sini”. Karena itulah pada dasarnya ideologi secara otomatis akan memberikan corak atau ciri khas kepada penganut-penganutnya yang membedakannya dengan penganut ideologi lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi berasal dari pemikiran seorang ideolog yang bersifat khas dan memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Friedrich (dalam Abdulgani, 1998:41), ideologi mengacu pada sistem gagasan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan tindakan untuk mengubah, memperbaharui, atau mempertahankan suatu tatanan politik atau sosial. Maka sebuah ideologi dapat ditelusuri dari tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang atau dengan kata lain tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang merupakan pencerminan dari ideologi yang dianutnya.

Selain membutuhkan pendekatan, penelitian ini juga membutuhkan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori peran (*role theory*). Menurut Bruce J.Cohen (1992: 76) peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang menduduki status tertentu. Menurut Levinson (dalam Soekanto, 2002: 243-244) peranan mencakup tiga hal, yaitu: a) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; b) usaha yang dilakukan individu dalam masyarakat; c) perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Penjelasan-penjelasan di atas memberikan pandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga dihasilkan melalui proses pemikiran yang panjang oleh seorang ideolog. Peneliti akan mengidentifikasi perjalanan ideologi Soekarno, khususnya pada masa-masa sebelum kata Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Hal ini dilakukan untuk melihat keselarasan ideologi Soekarno dengan ideologi Pancasila, sehingga dengan ditemukannya hubungan ideologis tersebut akan memperkuat fakta bahwa Soekarno adalah penggali Pancasila.

KERANGKA TEORI

BAB 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk, 1985:32). Metode sejarah memiliki empat langkah dalam melakukan penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi.

Tahap heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Heuristik adalah kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas (Sjamsuddin, 1996:67). Pada tahap heuristik ini sumber primer yang didapatkan penulis adalah buku yang berjudul “Sejarah Lahirnya Pancasila” yang diterbitkan oleh Yapeta Pusat, “Pengertian Pancasila” karya Mohammad Hatta, “Uraian Pancasila” karya Mohammad Hatta dkk, “Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila” yang diterbitkan oleh Inti Idayu Press, “Bung Karno, Islam, dan Pancasila” karya Ahmad Basarah, dan “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara” karya Nugroho Notokusanto. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari perpustakaan Universitas Jember, meminjam, dan koleksi pribadi penulis. Semua sumber yang dipaparkan di atas digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Setelah sumber sejarah terkumpul, tahap berikutnya adalah kritik sumber yang dilakukan setelah penulis berhasil mengumpulkan sumber yang selanjutnya akan dikritik untuk memperoleh keabsahan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern (Abdurrahman, 2007:68).

Kritik ekstern dilakukan oleh penulis dengan cara melihat dan menganalisis secara rinci literatur-literatur yang telah diperoleh sebelumnya. Kritik ekstern berkaitan dengan masalah otentisitas mengenai asli tidaknya suatu dokumen, jenis tinta yang digunakan, jenis ejaan, terjadinya pengurangan maupun penambahan teks dalam dokumen, penggunaan bahasa yang meragukan (*ambiguity*) identifikasi pengarang (Gottschalk, 1985:80-94). Penulis

menganalisis dan menelaah secara saksama terhadap sumber-sumber yang digunakan sehingga unsur latar belakang penulis, penerbit, tahun terbit, dan keasliannya dapat diketahui.

Kritik intern berkaitan dengan masalah kredibilitas suatu sumber untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya sebagai fakta sejarah atau tidak (Gottschalk, 1985:95). Dalam hal ini penulis tidak hanya mencermati bentuk fisiknya saja namun juga melihat substansi yang akan dijadikan sumber untuk dilakukan perbandingan dengan sumber lain terkait dengan kebenaran tentang isi buku yang dijadikan sebagai sumber dan apakah dapat dipercaya kebenarannya. Diharapkan dengan melakukan kritik intern semacam itu akan menghasilkan fakta yang dapat dipercaya (*credible*) dan dapat diandalkan (*reliable*).

Kritik sumber pertama yaitu buku Sejarah Lahirnya Pancasila. Kritik eksternya adalah buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) Pusat pada tahun 1994. Baik jenis tinta, jenis ejaan, dll sesuai pada zamannya. Buku ini berisikan tentang sarasehan yang berjudul “Melengkapi Sejarah Filsafat Bangsa Indonesia untuk Menghadapi Tantangan Masa Depan” yang bahan-bahannya ditulis oleh beberapa pengurus Yapeta Pusat. Kritik internnya adalah informasi yang terdapat pada buku ini dapat dipercaya karena para penulis melampirkan bukti-bukti yang konkrit dan juga disertai dengan pernyataan-pernyataan tokoh sejarah yang masih hidup pada saat itu.

Kritik sumber kedua yaitu buku Pengertian Pancasila. Kritik eksternya adalah buku ini ditulis oleh Mohammad Hatta yang diterbitkan oleh CV Haji Masagung Jakarta pada tahun 1979. Baik jenis tinta, jenis ejaan, dll sesuai pada zamannya. Buku ini merupakan pidato Mohammad Hatta pada saat peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Kritik internnya adalah informasi yang terdapat pada buku ini dapat dipercaya karena ditulis langsung oleh salah satu saksi sejarah lahirnya Pancasila, yaitu Mohammad Hatta.

Kritik sumber ketiga yaitu buku Uraian Pancasila. Kritik eksteralnya adalah buku ini ditulis oleh Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Sunario, dan A.G. Pringgodigdo yang diterbitkan oleh Mutiara Jakarta pada tahun 1984. Baik jenis tinta, jenis ejaan, dll sesuai pada zamannya. Buku ini merupakan hasil kerja dari Panitia Lima yang dibentuk oleh Presiden Soeharto. Kritik internnya adalah informasi yang terdapat pada buku ini dapat dipercaya karena ditulis langsung oleh saksi sejarah lahirnya Pancasila, yaitu Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Sunario, dan A.G. Pringgodigdo. Mereka adalah anggota BPUPK dan PPKI.

Kritik sumber keempat yaitu buku yang berjudul Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kritik eksteralnya adalah buku ini ditulis oleh Soemali Prawirosoedirdjo, Ruben Nalanan, Sunario, S.K. Trimurti, H.A. Notosoetardjo, H.M. Sanusi, dan Soerowo Abdoelmanap yang diterbitkan oleh Inti Idayu Press Jakarta pada tahun 1986. Baik jenis tinta, jenis ejaan, dll sesuai pada zamannya. Buku ini merupakan hasil kerja dari panitia yang dibentuk oleh Lembaga Soekarno-Hatta pada tahun 1983. Kritik internnya adalah informasi yang terdapat pada buku ini dapat dipercaya karena ditulis berdasarkan bukti-bukti yang konkrit oleh orang-orang yang berkompeten.

Kritik sumber kelima yaitu buku yang berjudul Bung Karno Islam dan Pancasila. Kritik eksteralnya adalah buku ini ditulis oleh Ahmad Basarah yang diterbitkan oleh Konstitusi Press pada tahun 2017. Baik jenis tinta, jenis ejaan, dll sesuai pada zamannya. Buku ini merupakan disertasi dari penulis buku. Kritik internnya adalah informasi yang terdapat pada buku ini dapat dipercaya karena merupakan hasil disertasi yang telah melalui ujian akademis oleh para guru besar di bidangnya.

Kritik sumber keenam yaitu buku yang berjudul Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Kritik eksteralnya adalah buku ini ditulis oleh Nugroho Notosusanto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1983. Baik jenis tinta, jenis ejaan, dll sesuai pada zamannya. Kritik internnya adalah informasi yang terdapat pada buku ini diragukan karena bertentangan dengan pendapat para saksi sezaman yang mengetahui proses perumusan Pancasila pada tahun 1945.

Selain itu penulis juga adalah sejarawan Orde Baru, yang mana pada era itu pemerintah menerapkan de-Soekarnoisasi atau usaha untuk menghapus Soekarno dari ingatan sejarah bangsa Indonesia.

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah interpretasi. Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 2013:78-79). Dalam proses interpretasi sejarah, penulis harus berusaha mencapai pengertian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.

Pada tahap ini penulis berusaha untuk menganalisis data yang diperoleh, kemudian membandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya. Penulis pada tahap ini melakukan penguraian terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian menghubungkannya menjadi suatu kesatuan yang logis. Fakta-fakta yang diperoleh oleh penulis kemudian disusun secara kronologis sehingga membentuk fakta rasional dan faktual yang berdasarkan pada aspek yang akan dikaji oleh penulis yaitu mengenai Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi yang merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penulis merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah (Gottschalk, 1985:32). Namun demikian penulis juga sadar bahwa dalam proses penulisan akan terdapat subyektifitas penulis. Penulis menganggap itu sebagai penjas dari masalah yang dikaji.

Sistematika skripsi dalam penelitian yang berjudul “Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945” adalah penyusunan peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 7 bab.

Bab 1 merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang alasan penelitian tersebut penting untuk dilakukan serta menguraikan batasan-batasan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya.

Bab 2 merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang *review* historiografi yaitu mengomentari dan menunjukkan hubungan atau keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan menunjukkan posisi penelitian.

Bab 3 merupakan Metode Penelitian yang berisi tentang uraian singkat penulis dalam usahanya memperoleh sumber, mencari fakta, menghubungkan fakta sejarah, hingga merangkainya menjadi sebuah tulisan sejarah.

Bab 4 berisi tentang kondisi budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila.

Bab 5 berisi tentang gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila.

Bab 6 berisi tentang usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

Bab 7 merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian peneliti mengenai penelitiannya dan saran yang berisi rekomendasi peneliti berdasarkan hasil penelitiannya untuk penelitian selanjutnya.

BAB 4. KONDISI BUDAYA DAN RELIGI BANGSA INDONESIA SEBELUM LAHIRNYA PANCASILA

Pancasila merupakan kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Pancasila pada saat itu masih berupa nilai-nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian diformulasikan oleh para pendiri negara Indonesia menjadi dasar, falsafah, dan ideologi negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila.

4.1 Budaya Asli Indonesia

Budaya asli bangsa Indonesia merupakan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum datangnya budaya-budaya pendatang seperti budaya Hindu-Buddha, Islam, dan Barat. Budaya asli bangsa Indonesia dapat diinterpretasikan sebagai budaya yang ada pada zaman prasejarah bangsa Indonesia. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum adanya berita atau keterangan tertulis mengenai suatu bangsa (dalam hal ini bangsa Indonesia).

Salah satu kebudayaan pada masa prasejarah adalah kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang (animisme) dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat dalam suatu benda (dinamisme). Menurut Alisjahbana (1977:12), kebudayaan asli Indonesia bersifat keseluruhan dan emosional, dalam artian bahwa perkembangan kebudayaan Indonesia asli sangat dipengaruhi oleh perasaan (emosi) baik dalam konteks perasaan manusia sebagai individu maupun perasaan manusia sebagai makhluk sosial. Kemunculan kepercayaan animisme dan dinamisme dilatar-belakangi oleh perasaan akan adanya kekuatan yang lebih besar di luar tubuh manusia itu sendiri. Animisme dan dinamisme merupakan corak asli religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia. Animisme dan dinamisme adalah interpretasi paling sederhana mengenai keberadaan “Tuhan” (sesuatu yang lebih kuasa di luar kuasa manusia). Menurut Simuh (dalam Darmaputera, 1992:41), kepercayaan animisme dan dinamisme tidak terlepas dari adanya kepercayaan masyarakat mengenai adanya kehidupan setelah mati. Orang Jawa

pada khususnya percaya bahwa roh orang yang telah meninggal akan tetap hidup dan bahkan menjadi sakti. Roh tersebut bisa bersifat positif (baik) dan juga sebaliknya bisa bersifat negatif (jahat). Oleh karena itulah kepercayaan dan ritual-ritual animisme dan dinamisme dipelihara sedemikian rupa sebagai sarana penghubung dengan kekuatan sakti (roh nenek moyang dan kekuatan gaib) yang digunakan untuk memelihara hubungan atau memanfaatkan sifat positif dari kekuatan sakti tersebut untuk kepentingan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dan sebaliknya ritual-ritual animisme dan dinamisme juga ditujukan untuk menghindari sifat-sifat negatif dari kekuatan sakti tersebut.

Berdasarkan budaya animisme dan dinamisme tersebut, telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak masa prasejarah telah mengenal keyakinan pada Tuhan, meskipun masih dalam taraf yang sederhana. Budaya inilah kemudian yang nantinya digunakan oleh Soekarno untuk menggali sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkembangan budaya asli bangsa Indonesia juga nampak dalam bidang sosio-budaya. Musken (dalam Darmaputera, 1992:23) bahkan menambahkan bahwa aktivitas yang terjadi seperti di atas terjadi dalam organisasi masyarakat yang tercipta sebagai dampak adanya pertanian (persawahan) dengan sistem irigasi. Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah desa. Desa sebagai sebuah satu-kesatuan masyarakat memiliki tujuan yang paling dasar yakni hidup rukun dan selaras di antara sesama penduduk desa. Sifat dan sikap rukun dan selaras dalam masyarakat menimbulkan hubungan timbal balik di antara mereka berupa nilai moral yang mengatur kehidupan bersama seperti gotong royong, toleransi, dan *tepo sliro*.

Berdasarkan penjelasan di atas, gotong royong merupakan budaya asli Indonesia dan tujuan utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini yang mendasari Soekarno untuk menyatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

Keadaan desa dengan sistem irigasi, juga menuntut adanya pengaturan atau pembagian irigasi yang adil, dalam kondisi seperti itulah muncul musyawarah mufakat untuk menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat desa. Proses musyawarah mufakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan sesepuh desa dan kepala desa. Sesepuh desa merupakan simbol pemelihara hubungan mikro dan makro kosmos yang dipercaya sebagai pengemban dan pemelihara tradisi-tradisi nenek moyang, sehingga segala keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan tradisi-tradisi yang telah ada sebelumnya. Sedangkan kepala desa sebagai seorang pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan kelebihanannya (*primus inter pares*) dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dan pengambil keputusan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008a:275). Muara dari musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan yang melibatkan semua unsur masyarakat desa (sesepuh desa, kepala desa, dan masyarakat) untuk menghasilkan keputusan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Proses seperti ini menandakan bahwa unsur-unsur demokrasi (dalam taraf sederhana) sudah ada dalam masyarakat pra-sejarah di Indonesia. Maka tidak berlebihan jika Suparlan (dalam Darmaputera, 1992:24) mengatakan bahwa desa merupakan tempat lahirnya tipe demokrasi asli Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam masa pra-sejarah di Indonesia telah berkembang demokrasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kerakyatan yang dilandasi oleh semangat musyawarah mufakat dan dijiwai oleh rasa ke-Tuhanan. Berdasarkan hal tersebut maka Soekarno merumuskan sila tentang Mufakat atau Demokrasi (sekarang sila ke-4 Pancasila).

4.2 Budaya-Budaya Pendatang yang Masuk ke Indonesia

Adanya interaksi budaya asli Indonesia dengan budaya-budaya pendatang yang masuk ke Indonesia makin memperkaya dan menyuburkan khasanah budaya asli Indonesia yang ada. Darmaputera (1992:18) mengatakan, tidak satupun budaya pendatang yang masuk ke Indonesia dibiarkan dalam bentuk aslinya tanpa diserap terlebih dahulu ke dalam budaya asli bangsa Indonesia. Dengan kata lain, setiap unsur budaya yang masuk ke Indonesia selalu melalui proses sinkretisasi

dengan budaya asli Indonesia. Maka tidak salah jika proses interaksi budaya asli dengan budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dapat disebut sebagai proses penyuburan budaya, dalam artian bahwa antara nilai-nilai positif dari budaya yang satu dengan budaya yang lain saling mengisi dan makin memperkaya budaya asli bangsa Indonesia.

4.2.1 Budaya India (Hindu-Buddha)

Budaya India atau yang lazim disebut budaya Hindu-Buddha merupakan budaya pendatang pertama yang berinteraksi dengan budaya asli Indonesia. Penyebaran budaya Hindu-Buddha berkaitan erat dengan perkembangan dan penyebaran agama Hindu dan Buddha yang berpusat di India. Penentuan kapan terjadinya kontak pertama budaya Hindu-Buddha dengan budaya asli Indonesia sangat sulit untuk dilakukan, karena bukti-bukti ke arah tersebut masih minim. Namun yang dapat dipastikan adalah masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia mengakhiri zaman pra-sejarah bangsa Indonesia dengan ditemukannya bukti-bukti tertulis (berupa prasasti dan berita-berita asing) yang mengantarkan bangsa Indonesia ke zaman sejarah.

Salah satu hal yang terkenal pada masa ini adalah Gagasan Nusantara Majapahit, yaitu suatu idealisme Majapahit untuk menyatukan wilayah pulau yang satu dengan yang lainnya, sebagai satu kesatuan geopolitik wawasan nusantara Majapahit di bawah kekuasaan Majapahit baik di dalam maupun di luar (Sugiyanto, 2006:131). Prinsip-prinsip Gagasan Nusantara adalah: (1) konsolidasi politik dalam negeri (wilayah Jawa Timur); (2) berusaha membuat front kekuatan dengan daerah-daerah di luar Jawa, dengan cara diplomasi maupun dengan kekerasan senjata; dan (3) berusaha mencapai hegemoni politik di Asia Tenggara (Sugiyanto, 2006:137). Gagasan Nusantara itu kemudian terwujud dalam bentuk “*sumpah amukti palapa*” yang diucapkan oleh Gajah Mada pada masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani (1328-1350 M). Pada saat itu Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih dan untuk membuktikan baktinya kepada Kerajaan Majapahit, Gajah Mada mengucapkan “*sumpah amukti palapa*” di hadapan Tribhuwanatunggadewi dan para pembesar Kerajaan

Majapahit lainnya dalam rangka pelaksanaan politik nusantara. *Sumpah amukti palapa* yang diucapkan Gajah Mada pada intinya adalah Gajah Mada akan “*amukti palapa*” setelah menaklukkan Nusantara (negeri seberang) yakni Gurun (Lombok), Seran (Seram), Tanjung Pura (Kalimantan), Haru (Sumatera Utara), Pahang (Malaya), Dompu, Bali, Sunda, Palembang (Sriwijaya), dan Tumasik (Singapura). *Amukti palapa* oleh Muljana (2005a:249) diartikan sama dengan kata “istirahat”, jadi Gajah Mada setelah bisa menaklukkan Nusantara (negeri seberang) baru akan *amukti palapa* atau beristirahat.

Gagasan politik persatuan negeri-negeri baik yang senegara (di Pulau Jawa) maupun di Nusantara (di luar Pulau Jawa) yang dilakukan pada masa Kerajaan Majapahit inilah yang mendasari Soekarno untuk merumuskan sila Kebangsaan Indonesia (sekarang sila ke-3 Pancasila).

4.2.2 Budaya Islam

Agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Mengenai awal kedatangan pengaruh agama dan budaya Islam ke Indonesia terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M dan pendapat lainnya mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M. Kedua pendapat tersebut didasarkan pada sumber sejarah yang sama kuat, sehingga pada akhirnya diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada abad ke-7 M dinyatakan sebagai awal kedatangan Islam ke beberapa tempat di Indonesia, sedangkan abad ke-13 M dijadikan sebagai bentuk konkret proses perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan yang bercorak Islam (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008c:180-181).

Salah satunya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 M). Pada masa Sultan Agung, cita-cita mempersatukan seluruh Pulau Jawa dicanangkan. Pada permulaan abad ke-17 hampir seluruh daerah di Pulau Jawa tunduk terhadap Kerajaan Mataram Islam (Suwarno, 1993:25). Pada tahun 1617

M daerah Wirasaba (Mojokerto), Lasem, dan Pasuruan dapat ditaklukkan, menyusul kemudian daerah Tuban (1620 M), Sukadana di Kalimantan (1622 M), Madura (1624 M), dan juga Surabaya (1625 M). Ditaklukkannya Surabaya menandakan bahwa seluruh daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur berada di bawah panji-panji Kerajaan Mataram Islam. Untuk mewujudkan cita-cita penyatuan seluruh daerah di Pulau Jawa, yang menjadi tujuan penaklukan selanjutnya adalah Banten dan Batavia. Batavia yang terlebih dahulu dikuasai oleh Belanda pada tahun 1619 M mendapat perhatian lebih besar dari Kerajaan Mataram Islam, karena untuk menguasai Banten, Kerajaan Mataram Islam harus menaklukkan Batavia terlebih dahulu. Tercatat bahwa Kerajaan Mataram Islam beberapa kali melakukan serangan ke Batavia yakni pada tahun 1628 M dan tahun 1629 M, yang kedua-duanya mengalami kegagalan. Kegagalan yang dialami oleh Sultan Agung tidak menyurutkan niatnya untuk menguasai Batavia dan mengusir Belanda dari Pulau Jawa. Sebuah rencana penyerangan yang matang telah disusun oleh Sultan Agung, namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Sultan Agung wafat pada tahun 1645 M.

Perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh Sultan Agung itu memperlihatkan nilai-nilai nasionalisme. Meskipun nasionalisme pada saat itu masih dalam skala kedaerahan dan baru mendapat bentuk utuhnya sebagai nasionalisme kebangsaan pada abad ke-20, namun hal tersebut telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak rela dijajah oleh bangsa mana pun. Hal ini yang mendasari Soekarno untuk merumuskan sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan (sekarang sila ke-2 Pancasila)

4.2.3 Budaya Barat

Penetrasi Barat (Eropa) ke Indonesia pada dasarnya didasari oleh tiga kepentingan yaitu *gold* (ekonomi), *glory* (petualangan), dan *gospel* (penyebaran agama). Ketiga kepentingan tersebut pada masing-masing negara Eropa yang masuk ke Indonesia memiliki komposisi dan prioritas yang berbeda antar satu negara dengan negara yang lain. Sebagai contoh, Portugis dan Spanyol yang pernah melakukan penetrasi perdagangan di Indonesia sekitar abad ke-16 M lebih

mengutamakan kepentingan ekonomi dan penyebaran agama Kristen di Indonesia, sedangkan negara Barat lainnya yakni Belanda yang pernah menjajah Indonesia lebih fokus pada kepentingan ekonomi daripada dua kepentingan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda aspek sosio-ekonomi dan sosio-budaya rakyat tidak berkembang (statis), karena pengaruh budaya Barat terhenti sampai kalangan atas saja (seperti raja, bangsawan, elit birokrat, dsb) yang tidak menyentuh kalangan rakyat bawah (rakyat kecil). Disengaja atau tidak, budaya Barat tidak pernah bersinggungan secara intensif dengan kehidupan rakyat banyak yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itulah rakyat Indonesia kebanyakan masih hidup dalam tradisi-tradisi dan nilai-nilai sosio-budaya lama yang mereka miliki.

Karena terjadi ketimpangan pada masa penjajahan itu, mengakibatkan tidak semua masyarakat Indonesia dapat hidup dengan adil dan sejahtera. Hal itulah yang mendasari Soekarno untuk merumuskan sila Kesejahteraan Sosial (sekarang sila ke-5 Pancasila).

BAB 5. GAGASAN SOEKARNO YANG MENDASARI UNTUK MENGKALI PANCASILA

Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901, anak kedua dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno lahir dari ayahnya seorang priyayi rendahan yang bekerja sebagai guru, sedangkan ibunya berasal dari kasta Brahmana di Bali. Kondisi ini pula yang menyebabkan Soekarno pada usia 5 tahun sempat diasuh oleh kakeknya, Raden Hardjodikromo, di Tulungagung (Adams, 2011:27-30). Kondisi sosial-ekonomi Soekarno inilah yang menjadikannya dekat dengan rakyat kecil (kaum Marhaen) yang akan dibelanya kelak.

Pada masa-masa sekolahnya di HBS, Soekarno mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran yang kelak membentuk dasar-dasar ideologinya. H.O.S. Tjokroaminoto yang dijuluki Belanda sebagai “raja Jawa yang tidak dinobatkan”, merupakan pemimpin politik orang Jawa yang memberikan pengaruh besar dalam peletakan dasar pemikiran dalam diri Soekarno (Adams, 2011:43). Kedekatan Soekarno dengan H.O.S. Tjokroaminoto, membuat Soekarno dekat dengan paham sosialisme dari Sarekat Islam. Menurut Alam (2003:6), H.O.S. Tjokroaminoto memperkenalkan segi sosialisme dalam Islam melalui SI, karena paham sosialisme pada saat itu dianggap sebagai lawan dari kapitalisme dan imperialisme. Disadari atau tidak, ideologi dan pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto sangat berpengaruh dalam diri dan pemikiran Soekarno. Selama di Surabaya, Soekarno aktif menulis untuk majalah *Oetoesan Hindia* yang dikelola oleh H.O.S. Tjokroaminoto dengan nama samaran “Bima” pada tahun 1917 dan menghasilkan lebih kurang 500 karangan (Adams, 2011:68). Pada salah satu tulisannya Soekarno menulis,

“Hancurkan segera kapitalisme yang dibantu oleh budaknya imperialisme. Dengan kekuasaan Islam Insha Allah itu segera dilaksanakan... Apa artinya memerintah sendiri kalau itu dilakukan oleh pengikut-pengikut kapitalisme dan imperialisme (Onghokham dalam Abdullah dkk., 1978:22)”.

Dari tulisan tersebut, dapat dilihat pengaruh ideologi Islam yang diusung oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan Sarekat Islam dalam diri dan pemikiran Soekarno.

Pada tanggal 10 Juni 1921, Soekarno lulus dari HBS dan kemudian meneruskan pendidikannya ke *Technische Hooge School* (THS, sekarang ITB) di Bandung. Di kota Bandung inilah Soekarno mulai serius menjadi pejuang politik. Embrio pemikiran yang sebelumnya telah dibentuk dan dipupuk oleh H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya, menjadi lebih berkembang dan lebih matang. Perkembangan dan pertumbuhan pemikiran Soekarno tersebut dipengaruhi oleh pandangan-pandangan politik dari tokoh-tokoh pergerakan pada saat itu.

Pengaruh lain yang menambah matang pemikiran Soekarno adalah pengalaman-pengalamannya sendiri mengenai kemiskinan rakyat di sekitarnya. Salah satu pengalaman tersebut terjadi pada saat Soekarno berusia 20 tahun. Soekarno bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhaen yang tinggal di Bandung Selatan. Dari pertemuan tersebut Soekarno kemudian merumuskan Marhaenisme. Penjelasan mengenai Marhaenisme tersirat dalam perkataan Soekarno di bawah ini,

“Petani-petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, dimana pada mulanya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama dan seterusnya sampai ke anak cucunya selama berabad-abad. Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban daripada imperialisme perdagangan Belanda, karena nenek moyangnya telah dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha yang kecil sekadar bisa memperpanjang hidupnya. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen (Soekarno, 1964:87)”.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Soekarno semakin yakin bahwa rakyat Indonesia menjadi miskin dan melarat karena imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejak saat itulah Soekarno menyebut rakyat Indonesia sebagai Marhaen, sebagai usaha untuk menyadarkan rakyat dari kesengsaraan yang diakibatkan imperialisme dan kolonialisme Belanda. Pengaruh pandangan politik tokoh-tokoh pergerakan Indonesia dan pengalaman-pengalaman pribadi Soekarno yang dijelaskan di atas, menjadikan pemikiran Soekarno lebih radikal

dan revolusioner serta terarah pada solusi untuk membebaskan rakyat dari belenggu imperialisme dan kolonialisme.

Pada tanggal 25 Mei 1926, Soekarno lulus dari THS dan memperoleh gelar “*ingenieur*”. Setelah lulus dari THS, Soekarno mulai serius menjalani profesi barunya sebagai pejuang politik yang sesungguhnya. Kesempatan menjadi asisten dosen di THS ditolak oleh Soekarno. Soekarno menganggap kurikulum di THS hanya akan makin memperkuat imperialisme dan kolonialisme Belanda dengan membangun jalan-jalan dan pabrik-pabrik serta membuat sistem irigasi untuk perkebunan demi kepentingan-kepentingan Belanda yang tidak akan menguntungkan rakyat sama sekali (Adams, 2011:93-94).

Ketika Soekarno mulai menjalani profesi sebagai pejuang politik yang sebenarnya pada kisaran tahun 1926, Soekarno dihadapkan pada situasi pergerakan Indonesia yang suram. Menurut Onghokham (dalam Abdullah dkk., 1978:27-28), sukuisme, agama-agama, dan isme-isme serta konflik-konflik sosial mengguncang dan memecah-belah pergerakan Indonesia pada saat itu. Suasana tersebut ternyata turut mengilhami Soekarno dalam menentukan arah politiknya di dunia pergerakan Indonesia. Kemampuan SI dengan daya tarik Islam-nya yang mampu menarik banyak simpatisan dan juga kemampuan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mengorganisasi pemberontakan dalam skala nasional terhadap Belanda pada tahun 1926, memberikan kesan tersendiri bagi Soekarno mengenai potensi Islam dan komunis dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia (Onghokham dalam Abdullah dkk., 1978:28).

Pada tahun 1926, Soekarno menulis artikel dalam *Soeloeh Indonesia Moeda* yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”. Berdasarkan analisis Soekarno, yang menjadi roh dalam organisasi pergerakan di Indonesia adalah Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme. Bagi Soekarno (1964:3), rakyat Indonesia pada dasarnya adalah sama dan tidak terbagi dalam golongan-golongan tertentu, yang membagi masyarakat dalam golongan-golongan adalah aliran isme-isme yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itulah untuk membentuk kekuatan rakyat melawan imperialisme dan kolonialisme, maka isme-isme tersebut harus dipersatukan. Menurut Soekarno (1964:6), meskipun ketiga

bentuk ideologi tersebut (Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme) berbeda satu sama lain, namun “musuh” atau “lawan” dari ketiga ideologi itu sama yakni imperialisme dan kolonialisme Belanda. Oleh karena itulah, Soekarno (1964:7) mengatakan, tidak ada gunanya ketiga ideologi tersebut berseteru dalam negeri jajahan, dan hanya dengan jalan persatuan ketiga ideologi itulah akan membawa Indonesi menuju kemerdekaan. Lebih lanjut dijelaskan, persatuan yang diinginkan Soekarno bukanlah meleburkan ketiga ideologi tersebut dalam satu ideologi tertentu atau perubahan paham di antara pengikut tiga ideologi tersebut, namun yang diinginkan hanya kerukunan, persatuan, dan kerjasama antara tiga ideologi tersebut untuk menuju jembatan emas kemerdekaan Indonesia (Soekarno, 1964:5).

Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno bersama Iskaq, Boediarto, Tjipto Mangoenkoesoemo, Tilaar, Soedjadi, dan Soenarjo mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) (Blumberger dalam Kartodirdjo, 1999:156). Melalui PNI Soekarno mensosialisasikan gagasannya, baik dalam bentuk pidato-pidato maupun dalam bentuk tulisan-tulisan di beberapa surat kabar. Tahun 1928 diakui Soekarno sebagai tahun pidato dan propaganda yang digunakan Soekarno untuk mensosialisasikan gagasannya (Adams, 2011:113). Melalui serangkaian pidatonya yang kharismatik pada rapat-rapat umum PNI, Soekarno dapat menyadarkan rakyat Indonesia akan konsep Indonesia merdeka, asas-asas kerakyatan, persatuan Indonesia, dsb (Kartodirdjo, 1999:157-158). Selain melalui pidato, ideologi dan pemikiran Soekarno juga banyak tertuang dalam tulisan-tulisannya yang diterbitkan pada beberapa surat kabar seperti *Oetoesan Hindia*, *Soeloeh Indonesia Moeda*, *Fikiran Ra'jat*, *Pandji Islam*, dan *Pemandangan* yang terbit tahun 1926 sampai menjelang masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tulisan-tulisan Soekarno berkisar pada tema-tema pokok mengenai persatuan Indonesia dan kritik terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia.

Konsep pertama dalam pemikiran Soekarno adalah konsep persatuan. Konsep ini selalu hadir dalam tulisan-tulisan Soekarno mulai dari masa pergerakan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Persatuan

merupakan konsep sentral dalam pemikiran Soekarno yang menjadi cita-cita dan tujuan akhir dari pemikiran Soekarno.

Originalitas konsep persatuan dalam pemikiran Soekarno dapat dilihat dari perbedaan konsep persatuan yang dianut oleh Soekarno dengan konsep persatuan yang dianut oleh organisasi-organisasi pergerakan pada saat itu. Konsep persatuan organisasi-organisasi pergerakan pada saat itu cenderung ke arah persatuan yang sempit, yang didasarkan pada unsur-unsur kesukuan, agama, dan ideologi (Kartodirdjo, 1999:120-121). Hal ini ditandai dengan banyaknya organisasi pergerakan yang menggunakan simbol-simbol kesukuan, agama, dan ideologi. Sebagai contoh, pengaruh simbol Islam yang melekat pada SI dapat dilihat dari anggotanya yang seluruhnya beragama Islam.

Berbeda dengan konsep persatuan yang dianut oleh organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya, konsep persatuan Soekarno lebih bersifat universal. Konsep persatuan Soekarno tidak didasarkan pada unsur-unsur kesukuan, agama, dan ideologi, melainkan didasarkan pada unsur bangsa yakni persatuan sebagai bangsa Indonesia.

Konsep kedua dalam pemikiran Soekarno adalah partai pelopor. Konsep partai pelopor secara tersirat diperkenalkan Soekarno dalam tulisannya di *Soeloeh Indonesia Moeda* yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” pada tahun 1926. Pada akhir tulisannya Soekarno mengatakan,

“...Dengan djalan jang djauh kurang sempurna, kita mentjoba membuktikan, bahwa faham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri djadjahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain... Kita yakin, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semua insjaf, bahwa Persatuan-lah jang membawa kita kearah ke-Besaran dan ke-Merdekaan... Sekarang tinggal menetapkan sahadja organisasinja, bagaimana Persatuan itu bisa berdiri; tinggal mentjari organisatornja sahadja, jang mendjadi Mahatma Persatuan itu (Soekarno, 1964:22)”.

Tulisan tersebut jelas menggambarkan keinginan Soekarno untuk menyatukan tiga roh kekuatan organisasi pergerakan Indonesia yakni Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam satu partai yang dikomando oleh satu pemimpin. Hal ini menggambarkan bagaimana konsep persatuan yang sebenarnya dalam pemikiran Soekarno.

Penegasan yang lebih konkret mengenai partai pelopor diungkapkan Soekarno dalam tulisannya berjudul “Mentjapai Indonesia Merdeka” pada tahun 1933. Menurut Soekarno (1964:281-282), partai pelopor adalah partai yang menuntun dan mendidik rakyat menjadi sadar akan jalan dan tujuannya sebagai massa aksi yang radikal untuk mengubah tatanan masyarakat lama (masyarakat kolonial) menjadi tatanan masyarakat baru yakni masyarakat yang merdeka. Partai pelopor yang diinginkan Soekarno ialah suatu partai gagah berani yang beranggotakan marhaen-marhaen yang paling sadar dan radikal dan menjadi komandan bagi partai-partai lainnya menuju kemenangan (Soekarno, 1964:283-284). Konsep partai pelopor inilah yang melandasi pendirian Permusyawaratan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang merupakan perkumpulan partai-partai politik yang berhaluan kebangsaan yang didirikan atas inisiatif Soekarno pada tahun 1928.

Konsep ketiga adalah sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme merupakan salah satu asas dari partai pelopor (asas lainnya adalah sosio-demokrasi). Sosio-nasionalisme adalah konsepsi mengenai nasionalisme-marhaen, yang sekaligus diproyeksikan sebagai antitesa nasionalisme Barat. Nasionalisme Barat dipahami Soekarno sebagai kepanjangan tangan dari imperialisme yang didasarkan pada nafsu menguasai negeri lain demi kepentingan duniawi. Nasionalisme yang diinginkan Soekarno ialah nasionalisme ke-Timur-an yang diyakini oleh Soekarno memiliki nilai lebih tinggi daripada nasionalisme Barat. Nasionalisme ke-Timur-an bersifat lebih luas daripada nasionalisme Barat yang didasari individualisme yang sempit sehingga melahirkan paham *chauvinisme* yang membangkitkan perpecahan di dunia dengan sifat agresifnya. Nasionalisme ke-Timur-an ialah nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberikan ruang untuk mencintai dan menghargai bangsa-bangsa lain, karena bangsa Indonesia maupun nasionalisme Indonesia merupakan bagian dari bangsa dan nasionalisme Asia dan juga bagian dari bangsa dan nasionalisme dunia (Soekarno, 1964:112).

Konsep sosio-nasionalisme dalam pemikiran Soekarno merupakan nasionalisme dua arah yang bergerak ke dalam dan ke luar yang kedua-duanya digunakan Soekarno untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Untuk gerak

ke dalam, Soekarno berusaha menciptakan nasionalisme bangsa Indonesia, sebagai usaha untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang terpecah-belah dalam berbagai golongan yang berlatar suku bangsa, agama, dan aliran-aliran ideologi. Onghokham (dalam Abdullah dkk., 1978:30) mengatakan, Soekarno dengan konsep nasionalismenya membuka babak baru perkembangan nasionalisme Indonesia di tengah-tengah kekacauan dan kebuntuan tujuan organisasi pergerakan Indonesia. Di sini terlihat usaha Soekarno dengan nasionalismenya berusaha mengubah paradigma “nasionalisme kesukuan”, “nasionalisme agama”, dan “nasionalisme ideologi” yang diintrodusasi organisasi-organisasi pergerakan pada saat itu.

Selain gerak ke dalam, konsep sosio-nasionalisme Soekarno juga bergerak ke luar. Gerak ke luar di sini jangan dipahami sebagai gerak yang agresif sebagaimana nasionalisme Barat, tetapi gerak ke luar nasionalisme Soekarno adalah mengusahakan terciptanya nasionalisme dunia atau internasionalisme. Sikap Soekarno ini dipengaruhi oleh pernyataan Mahatma Gandhi yang mengatakan “nasionalismeku adalah perikemanusiaan”. Pernyataan itulah yang menjadi salah satu ilham bagi Soekarno dalam melahirkan konsep internasionalisme. Penjelasan mengenai internasionalisme terlontar dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Mengenai konsep internasionalisme, Soekarno (1982:19-20) mengatakan,

“Kita tidak sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme bukanlah kosmopolitisme jang tidak mau adanya kebangsaan... Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme”.

Pernyataan Soekarno dalam pidatonya tersebut jelas menggambarkan bahwa nasionalisme yang diinginkannya adalah nasionalisme universal yang tidak bersifat kosmopolit yakni nasionalisme yang mengakui dan mengusahakan kerukunan dengan nasionalisme-nasionalisme bangsa lainnya di dunia.

Konsep terakhir dalam pemikiran Soekarno adalah sosio-demokrasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sosio-demokrasi merupakan satu

rangkaian dengan sosio-nasionalisme yang merupakan asas dari partai pelopor yang diidealisasikan oleh Soekarno. Selayaknya sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi merupakan antitesa dari demokrasi Barat. Menurut Elson (2009:77), Soekarno dalam perjuangannya selalu mengkritik kegagalan demokrasi Barat untuk mewakili secara layak kepentingan kelas bawah dan menjamin kemakmuran ekonomi segenap rakyat, berikut kecenderungannya untuk menguntungkan minoritas yang berkuasa.

Demokrasi yang diidealisasikan oleh Soekarno pada dasarnya adalah demokrasi yang menjamin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Menurut Soekarno (1964:320), demokrasi yang cocok bagi Indonesia merdeka adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjamin keselamatan rakyat seutuhnya. Demokrasi yang semacam inilah yang menjamin jalannya segala urusan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat, dengan rakyat, dan bagi rakyat. Demokrasi sejati yang semacam inilah yang disebut oleh Soekarno sebagai sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi inilah yang kemudian oleh Soekarno diperkenalkan sebagai prinsip mufakat/demokrasi dan kesejahteraan sosial pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam rangka usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Soekarno selalu berpegang dan selalu berusaha untuk mengimplementasikan gagasannya. Pokok-pokok pemikiran Soekarno seperti yang telah dijelaskan di atas tetap dipegang teguh oleh Soekarno hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak berhenti di situ saja, Soekarno selalu berusaha untuk mewujudkan ideologinya pada masa-masa pasca kemerdekaan dengan slogan “revolusi belum selesai”. Hal ini dapat dimengerti, karena tujuan akhir dari gagasan Soekarno adalah mewujudkan kemerdekaan penuh bagi rakyat Indonesia yang terbebas dari segala bentuk kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme baik dalam bentuk yang lama maupun yang baru (Neo-Kolonialisme dan Imperialisme = Nekolim).

BAB 7. PENUTUP

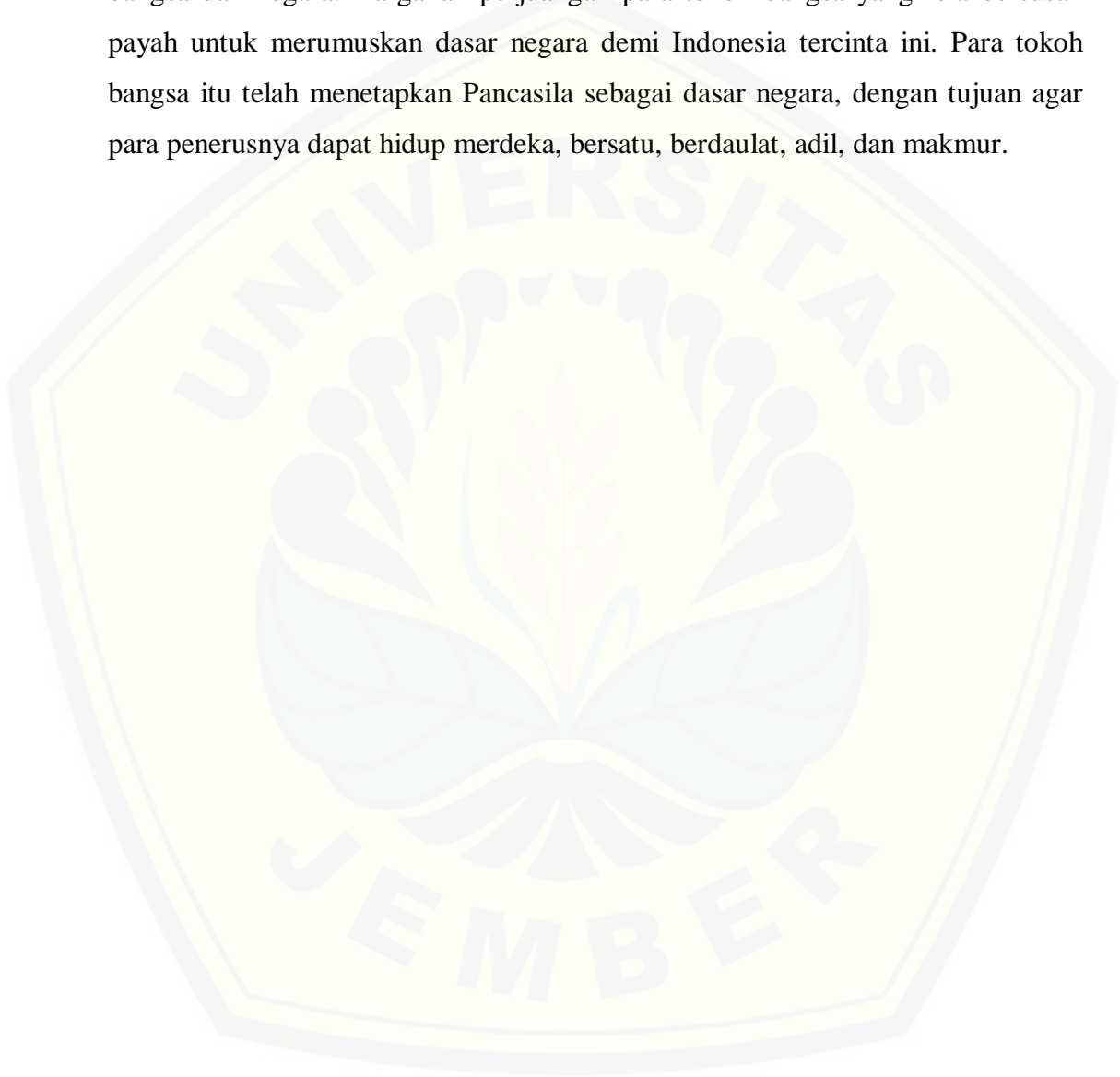
7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi sumber yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kehidupan budaya dan religi bangsa Indonesia sebelum lahirnya Pancasila berkembang pesat sebagai bagian adanya sinkretisasi budaya asli Indonesia dengan budaya-budaya pendatang. Hal ini tidak serta-merta menghilangkan budaya asli Indonesia, melainkan makin mempersubur dan memperkaya budaya asli yang berupa nilai-nilai luhur dan keahlian-keahlian yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai luhur ini pulalah yang di kemudian hari dirumuskan menjadi dasar negara Pancasila oleh Soekarno; gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila. Sejak zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Soekarno selalu konsisten dengan gagasannya. Hal itu yang menjadikan Pancasila Soekarno bisa diterima oleh semua golongan; usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno dengan konsistensi gagasannya berusaha menggali Pancasila yang bersumber dari khasanah bangsa Indonesia. Soekarno juga dengan kapasitasnya baik sebagai ketua Panitia Sembilan maupun ketua PPKI berusaha untuk mempersatukan berbagai sudut pandang para tokoh bangsa hingga akhirnya Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada segenap masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang cocok diterapkan di Indonesia, karena sila-silanya dan nilai-nilainya bersumber dari khasanah bangsa Indonesia. Apalagi sekarang di negeri kita sedang marak aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa

pihak yang ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan sistem khilafah. Jika ada usaha-usaha yang menginginkan agar Indonesia mengubah dasar negaranya dengan ideologi lain, maka hendaknya pemerintah mengambil sikap tegas dengan mencegah atau memusnahkan hal-hal itu, karena amat sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Hargailah perjuangan para tokoh bangsa yang rela bersusah payah untuk merumuskan dasar negara demi Indonesia tercinta ini. Para tokoh bangsa itu telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dengan tujuan agar para penerusnya dapat hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mahasin, dan Dhakidae. 1978. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Abdulgani, R. 1962. *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*. Jakarta: Jajasan Prapantja.
- Abdulgani, R. 1998. *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*. Jakarta: Grasindo.
- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adams, C. 2011. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Alam, W.T. 2003. *Demi Bangsa: Pertentangan Sukarno VS Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Alfian, dkk. 1992. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Alisjahbana, S.T. 1977. *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Jurusan Nilai-Nilai*. Jakarta: Idayu Press.
- Anshari, E.S. 1981. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB.
- Arinanto, S. 1997. "Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila: Studi tentang Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Polemik Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara". Tidak Diterbitkan. *Tesis*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Basarah, A. 2017. *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Darmaputera, E. 1992. *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Elson, R.E. 2008. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Terjemahan oleh Zia Anshor. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

- Fauzy, Soetomo, Wahyuningsih, dan Syam. 1983. *Pancasila: Ditinjau dari Segi Historis, Yuridis Konstitusional, dan Filosofis*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1975. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Terjemahan oleh I.P. Soewarsha dan M. Habib Mustopo. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hatta, M., dkk. 1984. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Hatta, M. 1989. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Jember University Press. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. 1999a. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium*. Jilid 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. 1999b. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kuntowijoyo. 2013. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Larrain, J. *Konsep Ideologi*. Terjemahan oleh Ryadi Gunawan. 1996. Yogyakarta: LKPSM.
- Lembaga Soekarno-Hatta. 1986. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Muljana, S. 2005a. *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LKIS.

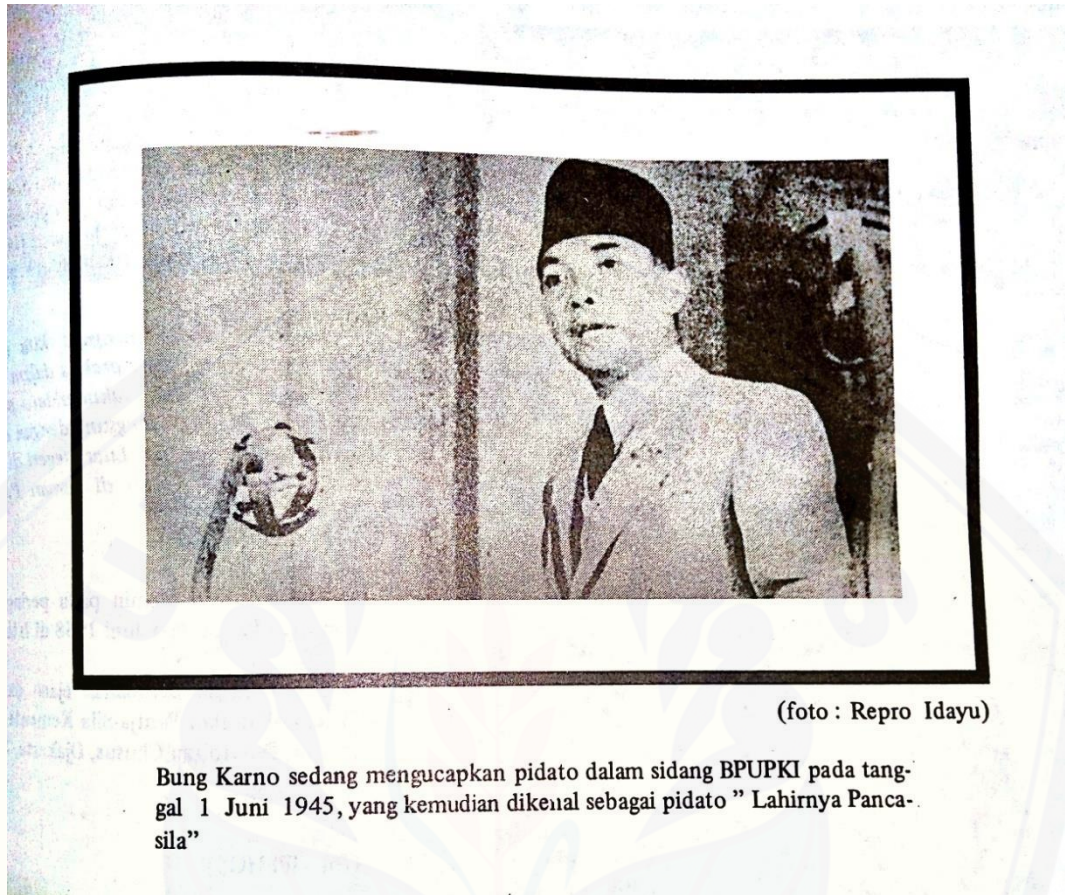
- Muljana, S. 2005b. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Budha dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKIS.
- Noer, D. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Notonagoro. 1988. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Notosusanto, N. 1983. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N. 2008a. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N. 2008b. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N. 2008c. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N. 2008d. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N. 2008e. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N. 2008f. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A.K. 1994. *Sejarah Pergerakan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sekretariat Negara. 1998. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sjamsuddin, H. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekarno. 1959. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Soekarno. 1961. *Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Jakarta: CV Dua R.
- Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid 1. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid 2. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Soekarno. 1965. *Tjapailah Bintang-Bintang di Langit*. Semarang: Pantja Satya.
- Soekarno. 1966. *Pantja Azimat Revolusi*. Surabaya: Grip.

- Soekarno. 1966. *Lahirnja Pantja Sila*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Soekarno. 2017. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Soekmono, R. 1981a. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekmono, R. 1981b. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekmono, R. 1981c. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jilid 3. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetrisno. 1977. *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Pandawa.
- Sugiyanto. 2006. *Peranan Gajah Mada dalam Mencapai Gagasan Nusantara sebagai Warisan Historis Bangsa Indonesia*. Artikel dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume VII Nomor 3, September 2006. Jember: Jurusan PIPS FKIP Universitas Jember.
- Sukarna. 1981. *Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Alumni.
- Suwarno. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tashadi, dkk. 1999. *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Dr. Ir. Soekarno dan KH. Ahmad Dahlan*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Utomo, C.B. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Yapeta. 1994. *Sejarah Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Yapeta.
- Yayasan Idayu. 1981. *Sekitar Tanggal dan Penggalinya: Guntingan Pers dan Bibliografi tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.

LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Nasional Indonesia	Peranan Soekarno dalam Menggali hingga Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Tahun 1945	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan menggunakan langkah sebagai berikut : 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi	Studi Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi budaya dan religi bangsa Indonesia sebelumahirnya Pancasila? 2. Bagaimana gagasan Soekarno yang mendasari untuk menggali Pancasila? 3. Bagaimana usaha Soekarno dalam menggali dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? 	Buku penunjang yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pepustakaan Pusat Unej 2. Perpustakaan Prodi Sejarah 3. Koleksi Dosen 4. KoleksiPribadi

LAMPIRAN B. SOEKARNO BERPIDATO 1 JUNI 1945



(foto : Repro Idayu)

Bung Karno sedang mengucapkan pidato dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai pidato "Lahirnya Pancasila"

Sumber: Yayasan Idayu. 1981. Sekitar Tanggal dan Penggalinya: Guntingan Pers dan Bibliografi tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Idayu, hal. 153.

LAMPIRAN C. PIDATO SOEKARNO DI HADAPAN SIDANG BPUPK 1 JUNI 1945

LAHIRNYA PANCASILA

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintan Paduka tuan Ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sdang Dkuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan: Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan “merdeka”.

Merdeka buat saya ialah “political independence”, politieke onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata: Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini “zwaarwichtig” akan perkara yang kecil-kecil “Zwaarwichtig” sampai kata orang Jawa “jelimet”. Jikalau sudah membicarakan

hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai jelimet! Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Amstrong yang menceritakan tentang Ibn Saud! Di situ ternyata bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu! Toh Saudi Arabia merdeka.

Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat Sovyet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovyet adakah rakyat Sovyet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyon rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Sovyet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovyet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia Merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, PT Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya buku, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancang sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya! Kalau benar semua hal ini harus

diselesaikan lebih dulu, sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, sampai di lobang kubur! (tepu tangan riuh)

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama “Mencapai Indonesia Merdeka”. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politike onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah suatu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, in one night only! kata Amstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyad dengan 6 orang! Sesudah “jembatan” itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade, yaitu orang Badui, diberi pelajaran bercocok-tanam. Nomade diubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, semuanya di seberang jematang.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovyet Rusia Merdeka, telah mempunyai Djnepprprostoff, dan yang maha besar di sungai Djeppr? Apa ia telah mempunyai radio-station, yan menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovyet Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis?

Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Greche, baru mengadakan Djnepprprostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat, jikalau tuan-tuan

demikian, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyar banyaknya. Dua milyar pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyar pemuda itu semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang!!! (Tepuk tangan riuh)

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi *zwaarwichtig*, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia Merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan "INDONESIA MERDEKA SEKARANG". Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka Sekarang, sekarang, sekarang! (Tepuk tangan riuh)....

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia Merdeka, kok lantas kita *zwaarwichtig* dan gentar-hati! Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political Independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo-Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, in one night, di dalam satu malam.

Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milyar, semuanya bersemboyan: Indonesia Merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata mangke rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Mereka? (Seruan audiens: Tidak! Tidak!)

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini Balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menit pun kita tidak akan menolak, sekarang pun kita menerima urusan itu, sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka! (Tepuk tangan audiens menggemparkan)

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbeaan antara Sovyet Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dan lain-lain tentang isinya: tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negaranya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk Merdeka. (Tepuk tangan riuh)

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata Ah, saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji f500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai meja kursi, yang selengkap-lengkapnya, sudah mempunyai sendok garpu perak satu set, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu “meja makan”, lantas satu sitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat tidur: kawin.

Sang Ndro yang mempunyai rumah gedung, electriche kookplaat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig, belum tentu mana yang lebih bahagia, Sang Ndro dengan tempat-

tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dn Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (tepuik tangan, dan tertawa).

Tekad hatinya yang perlu, tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai gerozilver satu kaset plus kinderuitzet, buat 3 tahun lamanya! (tertawa)

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah, saudara-saudara sekalian. Paduka tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian PT Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka! (tepuik tangan riuh)

Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Sovyet Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovyet Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata: Kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu, “Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka.”

Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat

sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internasionalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internasionalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahan, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: Merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahannya, sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka atau tidak? Mau merdeka atau tidak? (Hadirin serempak menjawab: Mauuu!)

Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal “merdeka” maka sekarang yang bicarakan tentang hal dasar.

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophisce grondslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu “Weltanschauung”, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas “Weltanschauung”. Hitler mendirikan Jermania di atas “national-sozialistische Weltanschauung”, filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Sovyet di

atas satu “Weltanschauung”. Yaitu Marxistische, Historisch-Materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas “Weltanschauung”, yaitu yang dinamakan “Tenoo Koodoo Seishin”. Di atas “Tenoo Koodoo Seishin” inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu “Weltanschauung”, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah, yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia: Apakah “Weltanschauung” kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, “Weltanschauung” ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia datang. Idealis-idealisme di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam “Weltanschauung” mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan. Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed: “Sovyet – Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin c.s.”, John Reed, di dalam kitabnya: “Ten days that shock the world”, “Sepuluh hari yang menggoncangkan dunia”, walaupun Lenin mendirikan Sovyet- Rusia di dalam 10 hari, tetapi “Weltanschauung”nya telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dulu telah tersedia “Weltanschauung”-nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu di atas “Weltanschauung” yang sudah ada. Dari 1895 “Weltanschauung” itu dicobakan di “generale-repetitie-kan”.

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri “generale-repetitie” daripada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, “Weltanschauung” itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarikan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas “Weltanschauung” yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya “Weltanschauung” itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini, “Weltanschauung” ini, dapat menjelma dengan dia punya “Munchener Putsch”, tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar “Weltanschauung” yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka tuan Ketua, timbullah pertanyaan: Apakah “Weltanschauung” kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan oleh doctor Sun Yat Sen?

Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi “Weltanschauung”nya telah diikhtiarkan tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangan. Di dalam buku “The three people’s principles” San Min Chu I, Mintsu, Minchuan, Min Sheng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, telah digambarkan oleh doctor Sun Yat Sen. Weltanschauung itu, baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas “Weltanschauung” San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka di atas “Weltanschauung” apa? Nasional-sosialisme-kah? Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau “Weltanschauung” apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju: Saya katakana lagi setuju! Yang Saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang Saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoeno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama

mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi “semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: Maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara. Janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nationale staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakana kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuan pun orang Indonesia, nenek tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya.

Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu” perlu orang-orang yang merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menyebut syarat bangsa: “le, desir d’etre ensemble”, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya “Die Nationalitätenfrage”, di situ ditanyakan: “Was ist eine Nation?” dan jawabnya ialah “Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. Inilah menurut Otto Bauer satu nation. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata “verouderd”, “sudah tua”. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah “verouderd”, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar, mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemeinschaft”nya dan perasaan orangnya, “l’ame et le desir”. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu

adalah satu kesatuan. Allah SWT, membuat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia adalah “golbreker” atau pengadang gelombang lautan Pacific adalah satu kesatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah-air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah-air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup “le desir d’etre ensemble”, tidak cukup definisi Otto Bauer “aus Schiksgemeinschaft erwachsene

Charaktergemeinschaft” itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada “desir d’etre ensemble”, adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2,5 milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan! Penduduk Jogja pun adalah merasa “le desir d’etre ensemble”, tetapi Jogja pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan “le desir d’etre ensemble”, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan.

Pendek kata, bahasa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan “le desir d’etre ensemble” di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogja, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “le desir d’etre ensemble”, sudah terjadi, Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adlah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu-satu, sekali lagi satu! (tepuk tangan hebat)

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jerman ialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar, dan Orissa, tetapi seluruh segitiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu, kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokroesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan national staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hassanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaityoo, Tuan menjawab: “Saya tidak mau akan kebangsaan”.

Tuan Lim Koem Hian: Bukan begitu! Ada sambungannya lagi.

Tuan Soekarno: Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya “mensch heid”, “peri kemanusiaan”. Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa!

Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, katanya: Jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, Alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, — ialah Dr. Sun Yat Sen! Di dalam tulisannya “San Min Chu I” atau “The Three People’s Principles”, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu.

Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh “The Three People’s Principles” itu, Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, — masuk ke lobang kabur. (Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan)

Saudara-saudara, Tetapi... tetapi... menentang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinism, sehingga berfaham “Indonesia Uber Alles”. Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal itu!

Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalisme, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”. “My nationalism is humanity”.

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “Deutschland uber Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsa minulyo, berambut jagung dan bermata biru “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedangkan bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian. Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesia yang terbagus dan termulya serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indoneia Merdeka tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Justru inilah prinsip-prinsip saya yang kedua. Inilah filosofiseli principle yang nomor dua; yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalisme”. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau akan adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua”, “semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam, –maaf beribu-ribu maaf keislaman saya jauh belum sempurna,– tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dari hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, jaga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat

Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat ini agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam kedalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat ini, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyatanya terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah, Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian baik yang bukan Islam, maupun terutama Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan.

Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilan tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di kalangan staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya, kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu

adil fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan!

Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip, itu yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakana tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democratie. Tetapi tidaklah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada satu badan perwakilan rakyat dan tidaklah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain dan tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar menurut resepnya Franche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politieke democratie saja: semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, — tak ada keadilan sosial, tidak ada economische democratie sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures yang menggambarkan polieteke democratie. “Di dalam Parlementaire Democratie”, kata Jean Jaures. “di dalam

Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama. Hak politik yang sama, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlement. Tetapi adakah sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu, Jean Jaures berkata lagi:

Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam Parlement dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik, sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”.

Adakah yang demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara, saya usulkan. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indoneia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, say tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie “Voorondestelt Ertelijheid”, turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya menghndaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara

pun dipilih. Tidaklah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Bagoes Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monachie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip:

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme, – atau perikemanusiaan

Mufakat, – atau demokrasi

Kesejahteraan sosial

Prinsip kelima hendaknya:

Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia atau Negara yang ber-Tuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin).

Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka

yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di sinilah, dalam pengakuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, di situlah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam, yaitu dengan cara yang berkebudayaan!

Saudara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: Pendawa Lima). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa- namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi... (tepuk tangan hadirin riuh rendah)

Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, hingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, Wistanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan sosio-nasionalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi politiek-economiche democratie, yaitu politieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu sana namakan socio-democratie.

Tinggal lagi Ketuhanan yang menghormati satu sama lain.

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: Socio-nationalisme, social-democratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang dengan trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “Gotong Royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong! (tepek tangan riuh-rendah)

“Gotong Royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarno satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama. Itulah Gotong-royong! (tepek tangan riuh rendah)

Prinsip Gotong-royong di antaranya yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara.

Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada Tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: trisila, ekasila, atukah pancasila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan, saudara-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia, -di dalam gunturunya peperangan! Bahkan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia merdeka, Indonesia yang gembengan. Indonesia Merdeka yang digembeng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indoneia yang lambat laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan yang bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan, untuk permufakatan, untuk sociale rechtvaardigheid: untuk Ketuhanan. Pancasila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun lalu. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah kepada saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realitiet dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitiet, jika tidak dengan perjuangan!

Jangan pun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia, jangan pun yang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen!

“De Mensch”, manusia! – harus perjuangankan itu. Zonder perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realitiet! Leninisme tidak bisa menjadi realitiet zonder perjuangan seluruh rakyat Rusia, San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjuangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu: zonder perjuangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama yang dapat menjadi realitiet. Jangan pun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Al Qur’an, zwart of wit (tertulis di atas kertas), tidak dapat menjelma menjadi realitiet zonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan umat Kristen.

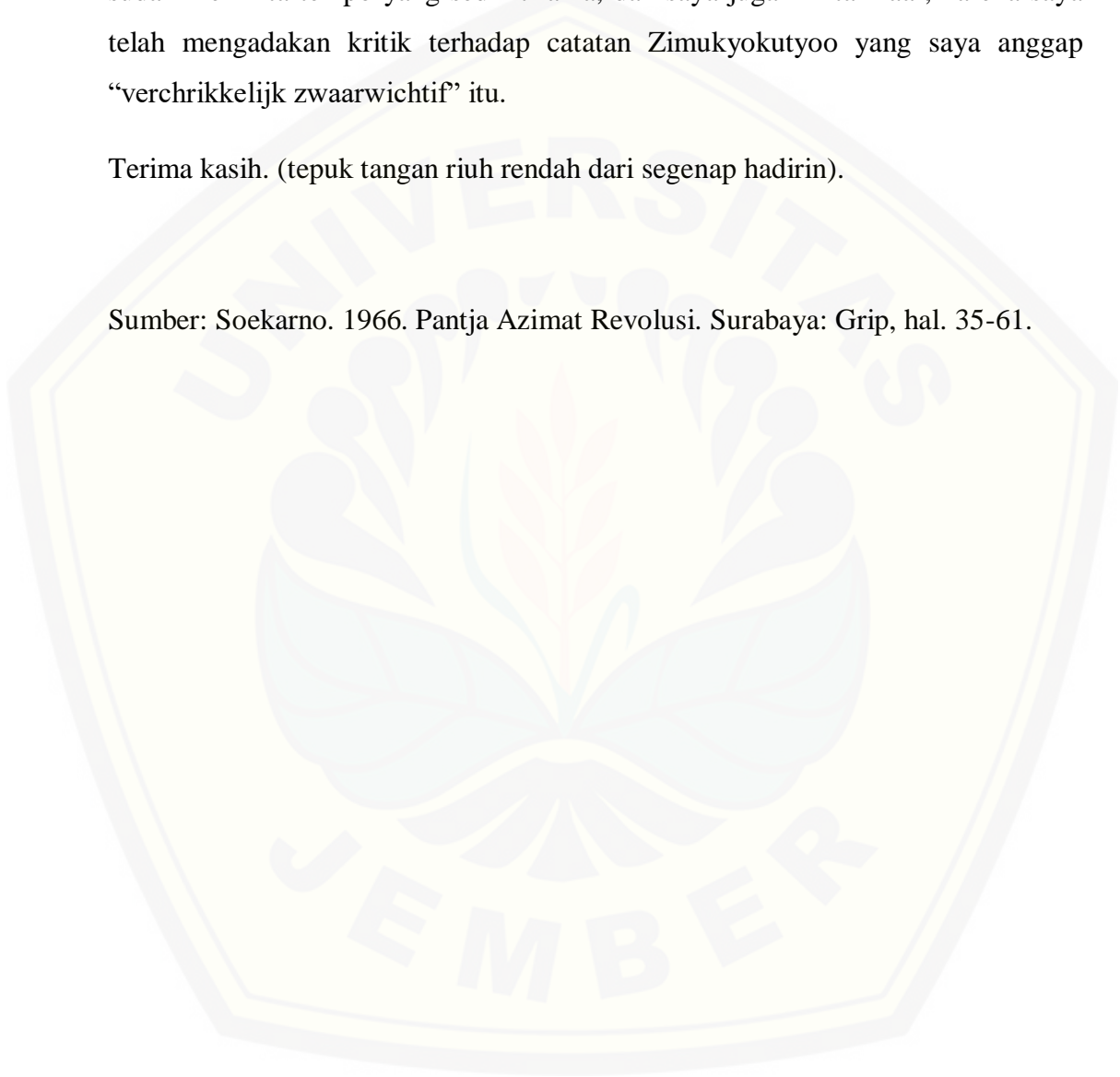
Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realitiet, yakni jikalau ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan Ketuhanan yang luas dan sempurna, – syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu-padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko,- tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudra yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai ke akhir zaman! Kemerdekaan

hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad “Merdeka, merdeka atau mati”! (tepuk tangan riuh)

Saudara-saudara! Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf, bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar, dan sudah meminta tempo yang sedikit lama, dan saya juga minta maaf, karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyokutyoo yang saya anggap “verchrikkelijk zwaarwichtif” itu.

Terima kasih. (tepuk tangan riuh rendah dari segenap hadirin).

Sumber: Soekarno. 1966. Pantja Azimat Revolusi. Surabaya: Grip, hal. 35-61.



LAMPIRAN D. NASIONALISME, ISLAMISME, MARXISME

(Artikel Soekarno di Suluh Indonesia Muda, 1926)

Sebagai Aria Bima-putera, yang lahirnya dalam zaman perjuangan, maka INDONESIA-MUDA inilah melihat cahaya hari pertama-tama dalam zaman yang rakyat-rakyat Asia, lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya. Tak senang dengan nasib-ekonominya, tak senang dengan nasib-politiknya, tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya.

Zaman “senang dengan apa adanya”, sudahlah lalu.

Zaman baru: zaman muda, sudahlah datang sebagai fajar yang terang cuaca.

Zaman teori kaum kuno, yang mengatakan, bahwa “siapa yang ada di bawah, harus terima-senang, yang ia anggap cukup-harga duduk dalam perbendaharaan riwayat, yang barang kemas-kemasnya berguna untuk memelihara siapa yang lagi berdiri dalam hidup”, kini sudahlah tak mendapat penganggapan lagi oleh rakyat-rakyat Asia itu. Pun makin lama makin tipislah kepercayaan rakyat-rakyat itu, bahwa rakyat-rakyat yang mempertuankannya itu, adalah sebagai “voogd” yang kelak kemudian hari akan “ontvoogden” mereka; makin lama makin tipislah kepercayaannya, bahwa rakyat-rakyat yang mempertuankannya itu ada sebagai “saudara-tua”, yang dengan kemauan sendiri akan melepaskan mereka, bilamana mereka sudah “dewasa”, “akil-balig”, atau “masak”.

Sebab tipisnya kepercayaan itu adalah bersendi pengetahuan, bersendi keyakinan, bahwa yang menyebabkan kolonisasi itu bukanlah keinginan pada kemasyhuran, bukan keinginan melihat dunia-asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakyat yang menjalankan kolonisasi itu ada terlampau sesak oleh banyaknya penduduk, – sebagai yang telah diajarkan oleh Gustav Klemm –, akan tetapi asalnya kolonisasi ialah teristimewa soal rezeki.

“Yang pertama-tama menyebabkan kolonisasi ialah hampir selamanya kekurangan bekal – hidup dalam tanah-airnya sendiri”, begitulah Dietrich Schafer berkata. Kekurangan rezeki, itulah yang menjadi sebab

rakyat-rakyat Eropah mencari rezeki di negeri lain! Itulah pula yang menjadi sebab rakyat-rakyat itu menjajah negeri-negeri, di mana mereka bisa mendapat rezeki itu. Itulah pula yang membikin “ontvoogding”-nya negeri-negeri jajahan oleh negeri-negeri yang menjajahnya itu, sebagai suatu barang yang sukar dipercayainya. Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul-nasinya, jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya!

Begitulah, bertahun-tahun, berwindu-windu, rakyat-rakyat Eropah itu mempertuankan negeri-negeri Asia. Berwindu-windu rezeki-rezeki Asia masuk ke negerinya. Teristimewa Eropah-Barat lah yang bukan main tambah kekayaannya.

Begitulah tragiknya riwayat-riwayat negeri-negeri jajahan!

Dan keinsyafan akan tragik inilah yang menyadarkan rakyat-rakyat jajahan itu; sebab, walaupun lahirnya sudah kalah dan takluk, maka Spirit of Asia masihlah kekal. Rokh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya! Keinsyafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia-kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai tiga sifat: NASIONALISTIS, ISLAMISTIS dan MARXISTIS lah adanya.

Mempelajari, mencahari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang mahabesar dan maha-kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangnya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya.

Akan hasil atau tidaknya kita menjalankan kewajiban yang seberat dan semulia itu, bukanlah kita yang menentukan. Akan tetapi, kita tidak boleh putus-putus berdaya-upaya, tidak boleh habis-habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang tahadi itu! Sebab kita yakin, bahwa p e r s a t u a n l a h yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita: Indonesia-Merdeka!

Entah bagaimana tercapainya persatuan itu; entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke-Indonesia-Merdeka itu, yalah Kapal-Persatuan adanya! Mahatma, jurumudi yang akan

membuat dan mengemudikan Kapal Persatuan itu kini barangkali belum ada, akan tetapi yakinlah kita pula, bahwa kelak kemudian hari mustilah datang saatnya, yang Sang-Mahatma itu berdiri di tengah kita! ...

Itulah sebabnya kita dengan besar hati mempelajari dan ikut meratakan jalan yang menuju persatuan itu. Itulah maksudnya tulisan yang pendek ini.

Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme!

Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rokhnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini.

Partai Boedi Oetomo, “marhum” Nationaal Indische Partij yang kini masih “hidup”, Partai Sarekat Islam, Perserikatan Minahasa; Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak partai-partai lain ... itu masing-masing mempunyai rokh Nasionalisme, rokh Islamisme, atau rokh Marxisme adanya. Dapatkah rokh-rokh ini dalam politik jajahan bekerja bersama-sama menjadi satu

Rokh yang Besar, Rokh Persatuan? Rokh Persatuan, yang akan membawa kita ke lapang ke-Besaran?

Dapatkah dalam tanah jajahan pergerakan Nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakekatnya tiada bangsa, dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perjuangan internasional?

Dapatkah Islamisme itu, ialah sesuatu agama, dalam politik jajahan bekerja bersama-sama dengan Nasionalisme yang mementingkan bangsa, dengan materialismenya Marxisme yang mengajar perbendaan?

Akan hasilkah usaha kita merapatkan Boedi Oetomo yang begitu sabar-halus (gematigd), dengan Partai Komunis Indonesia yang begitu keras sepaknya, begitu radical-militan terjangnya? Boedi Oetomo yang begitu evolusioner, dan Partai Komunis Indonesia, yang walaupun kecil sekali, oleh musuh-musuhnya begitu didesak dan dirintangi, oleh sebab rupa-rupanya musuh-musuh itu yakin akan peringatan A l C a r t h i l l, bahwa “yang mendatangkan pemberontakan-pemberontakan itu biasanya bagian-bagian yang terkecil, dan bagian-bagian yang terkecil sekali”?

Nasionalisme! Kebangsaan!

Dalam tahun 1882 Ernest Renan telah membuka pendapatnya tentang faham “bangsa” itu. “Bangsa” itu menurut pujangga ini ada suatu nyawa, suatu azas-akal, yang terjadi dari dua hal: pertama-tama rakyat itu d u l u n y a harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu.

Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan “bangsa” itu.

Dari tempo-tempo belakangan, maka selainnya penulis-penulis lain, sebagai Karl Kautsky dan Karl Radek, teristimewa O t t o B a u e r lah yang mempelajari soal “bangsa” itu.

“Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu”, begitulah katanya.

Nasionalisme itu ialah suatu iktikad; suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu “bangsa”!

Bagaimana juga bunyinya keterangan-keterangan yang telah diajarkan oleh pendekar-pendekar ilmu yang kita sebutkan di atas tadi, maka tetaplah, bahwa rasa nasionalistis itu menimbulkan suatu rasa percaya akan diri sendiri, rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan, yang mau mengalahkan kita.

Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang memberi keteguhan hati pada kaum Boedi Oetomo dalam usahanya mencari Jawa-Besar; rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati pada kaum revolusioner-nasionalis dalam perjuangannya mencari Hindia Besar atau Indonesia-Merdeka adanya.

Apakah rasa nasionalisme, – yang, oleh kepercayaan akan diri sendiri itu, begitu gampang menjadi kesombongan-bangsa, dan begitu gampang mendapat tingkatnya yang kedua, ialah kesombongan-ras, walaupun faham ras (jenis) ada setinggi langit bedanya dengan faham bangsa, oleh karena ras itu ada suatu faham biologis, sedang nationaliteit itu suatu faham sosiologis (ilmu pergaulan hidup), – apakah nasionalisme itu dalam perjuangan-jajahan bisa bergandengan dengan

Islamisme yang dalam hakekatnya tiada bangsa, dan dalam lahirnya dipeluk oleh bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam ras;- apakah Nasionalisme itu dalam politik kolonial bisa rapat-diri dengan Marxisme yang internasional, inter-rasial itu?

Dengan ketetapan hati kita menjawab: bisa!

Sebab, walaupun Nasionalisme itu dalam hakekatnya mengecualikan segala fihak yang tak ikut mempunyai “keinginan hidup menjadi satu” dengan rakyat itu; walaupun Nasionalisme itu sesungguhnya mengecilkan segala golongan yang tak merasa “satu golongan, satu bangsa” dengan rakyat itu; walaupun Kebangsaan itu dalam azasnya menolak segala perangai yang terjadinya tidak “dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu”, – maka tak boleh kita lupa, bahwa manusia-manusia yang menjadikan pergerakan Islamisme dan pergerakan Marxisme di Indonesia-kita ini, dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan Nasionalisme itu semuanya mempunyai “keinginan hidup menjadi satu”; – bahwa mereka dengan kaum Nasionalis itu merasa “satu golongan, satu bangsa”; – bahwa segala fihak dari pergerakan kita ini, baik Nasionalis maupun Islamis, maupun pula Marxis, beratus-ratus tahun lamanya ada “persatuan hal-ikhwal”, beratus-ratus tahun lamanya sama-sama bernasib tak merdeka! Kita tak boleh lalai, bahwa teristimewa “persatuan hal-ikhwal”, persatuan nasib, inilah yang menimbulkan rasa “segolongan” itu. Betul rasa-golongan ini masih membuka kesempatan untuk perselisihan satu sama lain; betul sampai kini, belum pernah ada persahabatan yang kokoh di antara fihak-fihak pergerakan di Indonesia-kita ini, – akan tetapi b u k a n l a h pula maksud tulisan ini membuktikan, bahwa perselisihan itu tidak bisa terjadi. Jikalau kita sekarang mau berselisih, amboi, tak sukarlah mendatangkan perselisihan itu sekarang pula!

Maksud tulisan ini ialah membuktikan, bahwa persahabatan bisa tercapai!

Hendaklah kaum Nasionalis yang mengecualikan dan mengecilkan segala pergerakan yang tak terbatas pada Nasionalisme, mengambil teladan akan sabda Karamchand Gandhi: “Buat saya, maka cinta saya pada tanah-air itu, masuklah dalam cinta pada segala manusia. Saya ini seorang patriot, oleh karena saya

manusia dan bercara manusia. Saya tidak mengecualikan siapa juga.” Inilah rahasianya, yang Gandhi cukup kekuatan mempersatukan fihak Islam dengan fihak Hindu, fihak Parsi, fihak Jain, dan fihak Sikh yang jumlahnya lebih dari tigaratus juta itu, lebih dari enam kali jumlah putera Indonesia, hampir seperlima dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini!

Tidak adalah halangannya Nasionalis itu dalam geraknya bekerja bersama-sama dengan kaum Islamis dan Marxis. Lihatlah kekalnya perhubungan antara Nasionalis Gandhi dengan Pan-Islamis Maulana Mohammad Ali, dengan Pan-Islamis Syaukat Ali, yang waktu pergerakan non-cooperation India sedang menghaibat, hampir tiada pisahnya satu sama lainnya. Lihatlah geraknya partai Nasionalis Kuomintang di Tiongkok, yang dengan ridla hati menerima faham-faham Marxis: tak setuju pada kemiliteran, tak setuju pada Imperialisme, tak setuju pada kemedalan!

Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berubah faham jadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu.

Bahwa sesungguhnya, asal mau sahaja ... tak kuranglah jalan ke arah persatuan. Kemauan, percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsyafan akan pepatah “rukun membikin sentausa” (itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan), cukup kuatnya untuk melangkahi segala perbedaan dan keseganan antara segala fihak-fihak dalam pergerakan kita ini.

Kita ulangi lagi: Tidak adalah halangannya Nasionalis itu dalam geraknya, bekerja bersama-sama dengan Islamis dan Marxis.

Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, – nasionalis yang bukan chauvinis, tak boleh tidak, haruslah menolak segala faham pengecualian yang sempit-budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copie atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, – nasionalis yang menerima rasa-nasionalismenya itu

sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala faham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada lain-lain sesuatu, sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.

Wahai, apakah sebabnya kecintaan-bangsa dari banyak nasionalis Indonesia lalu menjadi kebencian, jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang berkeyakinan Islamistis? Apakah sebabnya kecintaan itu lalu berbalik menjadi permusuhan, jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang bergerak Marxistis? Tiadakah tempat dalam sanubarinya untuk nasionalismenya Gopala Krishna Gokhate, Mahatma Gandhi, atau Chita Ranjam Das?

Janganlah hendaknya kaum kita sampai hati memeluk jingo-nationalism, sebagai jingo-nationalismnya Arya-Samaj di India pembelah dan pemecah persatuan Hindu-Muslim; sebab jingo-nationalism yang semacam itu “akhirnya pastilah binasa”, oleh karena “nasionalisme hanyalah dapat mencapai apa yang dimaksudkannya, bilamana bersendi atas azas-azas yang lebih suci”.

Bahwasanya, hanya nasionalisme ke-Timur-an yang sejatilah yang pantas dipeluk oleh nasionalis-Timur yang sejati. Nasionalisme Eropah, yalah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi, – nasionalisme yang semacam itu akhirnya pastilah kalah, pastilah binasa.

Adakah keberatan untuk kaum Nasionalis yang sejati, buat bekerja bersama-sama dengan kaum Islam, oleh karena Islam itu melebihi kebangsaan dan melebihi batas-negeri yalah super-nasional super-teritorial? Adakah internationaliteit Islam suatu rintangan buat geraknya nasionalisme, buat geraknya kebangsaan?

Banyak nasionalis-nasionalis di antara kita yang sama lupa bahwa pergerakan-nasionalisme dan Islamisme di Indonesia ini -ya, di seluruh Asia – ada sama asalnya, sebagai yang telah kita uraikan di awal tulisan ini: dua-duanya berasal nafsu melawan “Barat”, atau lebih tegas, melawan kapitalisme dan

imperialisme Barat, sehingga sebenarnya bukan lawan, melainkan kawannya lah adanya. Betapa lebih luhurnyalah sikap nasionalis

Prof. T. L. Vaswani, seorang yang bukan Islam, yang menulis: “Jikalau Islam menderita sakit, maka Rokh kemerdekaan Timur tentulah sakit juga; sebab makin sangatnya negeri-negeri Muslim kehilangan kemerdekaannya, makin lebih sangat pula imperialisme Eropah mencekek Rokh Asia. Tetapi, saya percaya pada Asia-sediakala; saya percaya bahwa Rokhnya masih akan menang. Islam adalah internasional, dan jikalau Islam merdeka, maka nasionalisme kita itu adalah diperkuat oleh segenap kekuatannya iktikad internasional itu.”

Dan bukan itu sahaja. Banyak nasionalis-nasionalis kita yang sama lupa, bahwa orang Islam, di manapun juga ia adanya, di seluruh “Darul Islam”, menurut agamanya, wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang ditempatinya. Nasionalis-nasionalis itu lupa, bahwa orang Islam yang sungguh-sungguh menjalankan ke-Islam-annya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. “Di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu ia masih menjadi satu bahagian daripada rakyat Islam, daripada Persatuan Islam. Di mana-mana orang Islam bertempat, di situlah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya”.

Inilah Nasionalisme Islam! Sempit-budi dan sempit-pikiranlah nasionalis yang memusuhi Islamisme serupa ini. Sempit-budi dan sempit-pikiranlah ia, oleh karena ia memusuhi suatu azas, yang, walaupun internasional dan inter-rasial, mewajibkan pada segenap pemeluknya yang ada di Indonesia, bangsa apa merekapun juga, mencintai dan bekerja untuk keperluan Indonesia dan rakyat Indonesia juga adanya!

Adakah pula keberatan untuk kaum Nasionalis sejati, bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, oleh karena Marxisme itu internasional juga?

Nasionalis yang segan berdekatan dan bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, – Nasionalis yang semacam itu menunjukkan ketiadaan yang sangat, atas pengetahuan tentang berputarnya roda-politik dunia dan riwayat. Ia lupa, bahwa

asal pergerakan Marxis di Indonesia atau Asia itu, juga merupakan tempat asal pergerakan mereka. Ia lupa, bahwa arah pergerakannya sendiri itu acap kali sesuai dengan arah pergerakan bangsanya yang Marxis tahadi. Ia lupa, bahwa memusuhi bangsanya yang Marxis itu, samalah artinya dengan menolak kawan-sejalan dan menambah adanya musuh. Ia lupa dan tak mengerti akan arti sikapnya saudara-saudaranya di lain-lain negeri Asia, umpamanya almarhum Dr. Sun Yat Sen, panglima Nasionalis yang besar itu, yang dengan segala kesenangan hati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis walaupun beliau itu yakin, bahwa peraturan Marxis pada saat itu belum bisa diadakan di negeri Tiongkok, oleh karena di negeri Tiongkok itu tidak ada syarat-syaratnya yang cukup-masak untuk mengadakan peraturan Marxis itu. Perlukah kita membuktikan lebih lanjut, bahwa Nasionalisme itu, baik sebagai suatu azas yang timbulnya dari rasa ingin hidup menjadi satu; baik sebagai suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa; maupun sebagai suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu, – perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa Nasionalisme itu, asal sahaja yang memeluknya mau, bisa dirapatkan dengan Islamisme dan Marxisme? Perlukah kita lebih lanjut mengambil contoh-contoh sikapnya pendekar-pendekar Nasionalis di lain-lain negeri, yang sama bergandengan tangan dengan kaum-kaum Islamis dan rapat-diri dengan kaum-kaum Marxis?

Kita rasa tidak! Sebab kita percaya bahwa tulisan ini, walaupun pendek dan jauh kurang sempurna, sudahlah cukup jelas untuk Nasionalis-nasionalis kita yang mau bersatu. Kita percaya, bahwa semua Nasionalis-nasionalis-muda adalah berdiri di samping kita. Kita percaya pula, bahwa masih banyaklah Nasionalis-nasionalis kolot yang mau akan persatuan; hanyalah kebimbangan mereka akan kekalnya persatuan itulah yang mengecilkan hatinya untuk mengikhtiarkan persatuan itu. Pada mereka itulah terutama tulisan ini kita hadapkan; untuk mereka lah terutama tulisan ini kita adakan.

Kita tidak menuliskan rencana ini untuk Nasionalis-nasionalis yang tidak mau bersatu. Nasionalis-nasionalis yang demikian itu kita serahkan pada

pengadilan riwayat, kita serahkan pada putusannya mahkamah histori! Islamisme, Ke-Islam-an!

Sebagai fajar sehabis malam yang gelap-gulita, sebagai penutup abad-abad kegelapan, maka di dalam abad kesembilanbelas berkilau-kilauanlah di dalam dunia ke-Islam-an sinarnya dua pendekar, yang namanya tak akan hilang tertulis dalam buku-riwayat Muslim; Sheikh Mohammad Abdouh, Rektor sekolah-tinggi Azhar, dan Seyid Jamaluddin El Afghani – dua panglima Pan-Islam-isme yang telah membangunkan dan menjunjung rakyat-rakyat Islam di seluruh benua Asia daripada kegelapan dan kemunduran. Walaupun dalam sikapnya dua pahlawan ini ada perbedaan sedikit satu sama lain – Seyid Jamaluddin El Afghani ada lebih radikal dari Sheikh Mohammad Abdouh – maka merekalah yang membangunkan lagi kenyataan-kenyataan Islam tentang politik, terutama Seyid Jamaluddin, yang pertama-tama membangunkan rasa-perlawanan di hati sanubari rakyat-rakyat Muslim terhadap pada bahaya imperialisme Barat; merekalah terutama Seyid Jamaluddin pula, yang mula-mula mengkhotbahkan suatu barisan rakyat Islam yang kokoh, guna melawan bahaya imperialisme Barat itu.

Sampai pada wafatnya dalam tahun 1896, Seyid Jamaluddin El Afghani, harimau yang gagah-berani itu, bekerja dengan tiada berhentinya, menanam benih ke-Islam-an di mana-mana, menanam rasa-perlawanan terhadap pada ketamaan Barat, menanam keyakinan, bahwa untuk perlawanan itu kaum Islam harus “mengambil tekniknya kemajuan Barat, dan mempelajari rahasia-rahasianya kekuasaan Barat”. Benih-benih itu tertanam! Sebagai ombak makin lama makin haibat, sebagai gelombang yang makin lama makin tinggi dan besar, maka di seluruh dunia Muslim tentara-tentara Pan-Islamisme sama bangun dan bergerak dari Turki dan Mesir, sampai ke Marocco dan Kongo, ke Persia, Afghanistan ... membanjir ke India, terus ke Indonesia ... gelombang Pan-Islamisme melimpah ke mana-mana!

Begitulah rakyat Indonesia kita ini, insyaf akan tragik nasibnya, sebagian sama bernaung di bawah bendera hijau, dengan muka ke arah Qiblah, mulut mengaji *La haula wala kauwata illa billah dan Billahi fisabilil ilahi!*

Mula-mula masih perlahan-lahan, dan belum begitu terang-benderanglah jalan yang harus diinjaknya, maka makin lama makin nyata dan tentulah arah-arah yang diambilnya, makin lama makin banyaklah hubungannya dengan pergerakan-pergerakan Islam di negeri-negeri lain; makin teranglah ia menunjukkan perangnya yang internasional; makin mendalamlah pula pendiriannya atas hukum-hukum agama. Karenanya, tak hairanlah kita, kalau seorang profesor Amerika, Ralston Hayden, menulis, bahwa pergerakan Sarekat Islam ini “akan berpengaruh besar atas kejadiannya politik di kelak kemudian hari, bukan sahaja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia Timur jua adanya”! Ralston Hayden dengan ini menunjukkan keyakinannya akan perangai internasional dari pergerakan Sarekat Islam itu; ia menunjukkan pula suatu penglihatan yang jernih di dalam kejadian-kejadian yang belum terjadi pada saat ia menulis itu. Bukankah tujuannya telah terjadi? Pergerakan Islam di Indonesia telah ikut menjadi cabangnya Mu'tamar-ul Alamil Islami di Mekkah; pergerakan Islam Indonesia telah menceburkan diri dalam laut perjuangan Islam Asia!

Makin mendalamnya pendirian atas keagamaan pergerakan Islam inilah yang menyebabkan keseganan kaum Marxis untuk merapatkan diri dengan pergerakan Islam itu; dan makin ke mukanya sifat internasional itulah oleh kaum Nasionalis “kolot” dipandang tersesat; sedang hampir semua Nasionalis, baik “kolot” maupun “muda”, baik evolusioner maupun revolusioner, sama berkeyakinan bahwa agama itu tidak boleh dibawa-bawa ke dalam politik adanya. Sebaliknya, kaum Islam yang “fanatik”, sama menghina politik kebangsaan dari kaum Nasionalis, menghina politik kerezekian dari kaum Marxis; mereka memandang politik kebangsaan itu sebagai sempit, dan mengatakan politik kerezekian itu sebagai kasar. Pendek kata, sudah “sempurna”- lah adanya perselisihan faham!

Nasionalis-nasionalis dan Marxis-marxis tahadi sama menuduh pada agama Islam, yang negeri-negeri Islam itu kini begitu rusak keadaannya, begitu rendah derajatnya, hampir semuanya di bawah pemerintahan negeri-negeri Barat. Mereka kusut-faham! Bukan Islam, melainkan yang memeluknyalah yang salah! Sebab dipandang dari pendirian nasional dan pendirian sosialistis, maka tinggi

derajat dunia Islam pada mulanya sukarlah dicari bandingannya. Rusaknya kebesaran-nasional, rusaknya sosialisme Islam bukanlah disebabkan oleh Islam sendiri; rusaknya Islam itu yalah oleh karena rusaknya budi-pekerti orang-orang yang menjalankannya. Sesudah Amir Muawiah mengutamakan azas dinastis-keduniawian untuk aturan Chalifah, sesudahnya “Chalifah-chalifah itu menjadi Raja”, maka padamlah tabiat Islam yang sebenarnya. “Amir Muawiah-lah yang harus memikul pertanggung jawaban atas rusaknya tabiat Islam yang nyata bersifat sosialis dengan sebenar-benarnya”, begitulah Oemar Said Tjokroaminoto berkata. Dan, dipandang dari pendirian nasional, tidakkah Islam telah menunjukkan contoh-contoh kebesaran yang mencengangkan bagi siapa yang mempelajari riwayat-dunia, mencengangkan bagi siapa yang mempelajari riwayat-kultur?

Islam telah rusak, oleh karena yang menjalankannya rusak budi-pekertinya. Negeri-negeri Barat telah merampas negeri-negeri Islam oleh karena pada saat perampasan itu kaum Islam kurang tebal tauhidnya, dan oleh karena menurut wet evolusi dan susunan pergaulan-hidup bersama, sudah satu “historische Notwendigkeit”, satu keharusan-riwayat, yang negeri-negeri Barat itu menjalankan perampasan tahadi. Tebalnya tauhid itulah yang memberi keteguhan pada bangsa Riff menentang imperialisme Sepanyol dan Perancis yang bermeriam dan lengkap bersenjata!

Islam yang sejati tidaklah mengandung azas anti-nasionalis; Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas-budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum Islamis tidak berdiri di atas Sirothol Mustaqim; selama itu tidakkah ia bisa mengangkat Islam dari kenistaan dan kerusakan tahadi! Kita sama sekali tidak mengatakan yang Islam itu setuju pada Materialisme atau perbendaan; sama sekali tidak melupakan yang Islam itu melebihi bangsa, super-nasional. Kita hanya mengatakan, bahwa Islam yang sejati itu mengandung tabiat-tabiat yang sosialis dan menetapkan kewajiban-kewajibannya yang menjadi kewajiban-kewajibannya nasionalis pula!

Bukankah, sebagai yang sudah kita terangkan, Islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami, mencintai dan bekerja untuk rakyat di antara mana ia hidup, selama negeri dan rakyat itu masuk Darul-Islam?

Seyid Jamaluddin El Afghani di mana-mana telah mengkhotbahkan nasionalisme dan patriotisme, yang oleh musuhnya lantas sahaja disebutkan “fanatisme”; di mana-mana pendekar Pan-Islamisme ini mengkhotbahkan hormat akan diri sendiri, mengkhotbahkan rasa luhur-diri, mengkhotbahkan rasa kehormatan bangsa, yang oleh musuhnya lantas sahaja dinamakan “chauvinisme” adanya.

Di mana-mana, terutama di Mesir, maka Seyid Jamaluddin menanam benih nasionalisme itu; Seyid Jamaluddin lah yang menjadi “bapak nasionalisme Mesir di dalam segenap bagian-bagiannya”.

Dan bukan Seyid Jamaluddin sahajalah yang menjadi penanam benih nasionalisme dan cinta-bangsa. Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Mohammad Farid Bey, Ali Pasha, Ahmed Bey Agayeff, Mohammad Ali dan Shaukat Ali ... semuanya adalah panglimanya Islam yang mengajarkan cinta-bangsa, semuanya adalah propagandis nasionalisme di masing-masing negerinya! Hendaklah pemimpin-pemimpin ini menjadi teladan bagi Islamis-islamisme kita yang “fanatik” dan sempit-budi, dan yang tidak suka mengetahui akan wajibnya merapatkan diri dengan gerakan bangsanya yang nasionalistis. Hendaklah Islamis-islamisme yang demikian itu ingat, bahwa pergerakannya yang anti-kafir itu, pastilah menimbulkan rasa nasionalisme, oleh karena golongan-golongan yang disebutkan kafir itu adalah kebanyakan dari lain bangsa, bukan bangsa Indonesia! Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang layak bukanlah Islamisme yang sejati; Islamisme yang demikian itu adalah Islamisme yang “kolot”, Islamisme yang tak mengerti aliran zaman!

Demikian pula kita yakin, bahwa kaum Islamis itu bisalah kita rapatkan dengan kaum Marxis, walaupun pada hakekatnya dua fihak ini berbeda azas yang lebar sekali. Pedihlah hati kita, ingat akan gelap-gulitanya udara Indonesia, tatkala beberapa tahun yang lalu kita menjadi saksi atas suatu perkelahian saudara;

menjadi saksi pecahnya permusuhan antara kaum Marxis dan Islamis; menjadi saksi bagaimana tentara pergerakan kita telah terbelah jadi dua bahagian yang memerangi satu sama lainnya. Pertarungan inilah isinya halaman-halaman yang paling suram dari buku-riwayat kita! Pertarungan saudara inilah yang membuang sia-sia segala kekuatan pergerakan kita, yang mustinya makin lama makin kuat itu; pertarungan inilah yang mengundurkan pergerakan kita dengan puluhan tahun adanya!

Aduhai! Alangkah kuatnya pergerakan kita sekarang umpama pertarungan saudara itu tidak terjadi. Niscaya kita tidak rusak-susunan sebagai sekarang ini; niscaya pergerakan kita maju, walaupun rintangan yang bagaimana juga!

Kita yakin, bahwa tiadalah halangan yang penting bagi persahabatan Muslim-Marxis itu. Di atas sudah kita terangkan, bahwa Islamisme yang sejati itu ada mengandung tabiat-tabiat yang sosialis. Walaupun sosialis itu masih belum tentu bermakna Marxistis, walaupun kita mengetahui bahwa sosialisme Islam itu tidak bersamaan dengan azas Marxisme, oleh karena sosialisme Islam itu berazas Spiritualisme, dan sosialismenya Marxisme itu berazas Materialisme (perbendaan); walaupun begitu, maka untuk keperluan kita cukuplah agaknya jikalau kita membuktikan bahwa Islam sejati itu sosialislah adanya.

Kaum Islam tak boleh lupa, bahwa pandangan Marxisme tentang riwayat menurut azas-perbendaan (*materialistische historie opvatting*) inilah yang seringkali menjadi penunjuk-jalan bagi mereka tentang soal-soal ekonomi dan politik-dunia yang sukar dan sulit; mereka tak boleh pula lupa, bahwa caranya (*methode*) Historis-Materialisme (ilmu perbendaan berhubungan dengan riwayat) menerangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di muka-bumi ini, adalah caranya menujumkan kejadian-kejadian yang akan datang, adalah amat berguna bagi mereka!

Kaum Islamis tidak boleh lupa, bahwa kapitalisme, musuh Marxisme itu, yalah musuh Islamisme pula! Sebab *meerwaarde* sepanjang faham Marxisme, dalam hakekatnya tidak lainlah daripada *riba* sepanjang faham Islam. *Meerwaarde*, yalah teori: memakan hasil pekerjaan lain orang, tidak memberikan bahagian keuntungan yang seharusnya menjadi bahagian kaum buruh yang

bekerja mengeluarkan untung itu, – teori meerwaarde itu disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menerangkan asal-asalnya kapitalisme terjadi. Meerwaarde inilah yang menjadi nyawa segala peraturan yang bersifat kapitalistis; dengan memerangi meerwaarde inilah, maka kaum Marxisme memerangi kapitalisme sampai pada akar-akarnya!

Untuk Islamis sejati, maka dengan lekas sahaja teranglah baginya, bahwa tak layaklah ia memusuhi faham Marxisme yang melawan peraturan meerwaarde itu, sebab ia tak lupa, bahwa Islam yang sejati juga memerangi peraturan itu; ia tak lupa, bahwa Islam yang sejati melarang keras akan perbuatan memakan riba dan memungut bunga. Ia mengerti, bahwa riba ini pada hakekatnya tiada lain daripada meerwaardenyafaham Marxisme itu!

“Janganlah makan riba berlipat-ganda dan perhatikanlah kewajibanmu terhadap Allah, moga-moga kamu beruntung!”, begitulah tertulis dalam Al Qur’an, surah Al ‘Imran, ayat 129!

Islamis yang luas pandangan, Islamis yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan perlawanan kita, pastilah setuju akan persahabatan dengan kaum Marxis, oleh sebab ia insyaf bahwa memakan riba dan pemungutan bunga, menurut agamanya adalah suatu perbuatan yang terlarang, suatu perbuatan yang haram; ia insyaf, bahwa inilah caranya Islam memerangi kapitalisme sampai pada akar dan benihnya, oleh karena, sebagai yang sudah kita terangkan di muka, riba ini sama dengan meerwaarde yang menjadi nyawanya kapitalisme itu. Ia insyaf, bahwa sebagai Marxisme, Islam pula, “dengan kepercayaannya pada Allah, dengan pengakuannya atas Kerajaan Tuhan, adalah suatu protes terhadap kejahatannya kapitalisme”.

Islamis yang “fanatik” dan memerangi pergerakan Marxisme adalah Islamis yang tak kenal akan larangan-larangan agamanya sendiri. Islamis yang demikian itu tak mengetahui, bahwa, sebagai Marxisme, Islamisme yang sejati melarang penumpukan uang secara kapitalistis, melarang penimbunan harta-benda untuk keperluan sendiri. Ia tak ingat akan ayat Al Qur’an: “Tetapi kepada barang siapa menumpuk-numpuk emas dan perak dan membelanjakan dia tidak menurut

jalannya Allah khabarkanlah akan mendapat satu hukuman yang celaka!” Ia mengetahui, bahwasebagai Marxisme yang dimusuhi itu agama Islam dengan jalan yang demikian itu memerangi wujudnya kapitalisme dengan seterang-terangnya!

Dan masih banyaklah kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam yang bersamaan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Marxisme itu! Sebab tidakkah pada hakekatnya faham kewajiban zakat dalam agama Islam itu, suatu kewajiban si kaya membagikan rezekinya kepada si miskin, pembagian-rezeki mana dikehendaki pula oleh Marxisme, – tentu sahaja dengan cara Marxisme sendiri? Tidakkah Islam bercocokkan anasir-anasir “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” dengan Marxisme yang dimusuhi oleh banyak kaum Islamis itu? Tidakkah Islam yang sejati telah membawa “segenap peri-kemanusiaan di atas lapang kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan”? Tidakkah nabi-Islam sendiri telah mengajarkan persamaan itu dengan sabda: “Hai, aku ini hanyalah seorang manusia sebagai kamu; sudahlah dilahirkan padaku, bahwa Tuhanmu yalah Tuhan yang satu?” Bukankah persaudaraan ini diperintahkan pula oleh ayat 13 Surah Al-Hujarat, yang bunyinya: “Hai manusia, sungguhlah kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan dari padamu suku-suku dan cabang-cabang keluarga, supaya kamu berkenal-kenalan satu sama lain?” Bukankah persaudaraan ini “tidak tinggal sebagai persaudaraan di dalam teori sahaja”, dan oleh orang-orang yang bukan Islam diaku pula adanya? Tidakkah sayang beberapa kaum Islamis memusuhi suatu pergerakan, yang anasir-anasirnya juga berbunyi “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan”?

Hendaklah kaum Islam yang tak mau merapatkan diri dengan kaum Marxis, sama ingat, bahwa pergerakannya itu, sebagai pergerakan Marxis, adalah suatu gaung atau kumandangnyajerit dan tangis rakyat Indonesia yang makin lama makin sempit kehidupannya, makin lama makin pahit rumah tangganya. Hendaknya kaum itu sama ingat, bahwa pergerakannya itu dengan pergerakan Marxis, banyaklah persesuaian cita-cita, banyak lah persamaan tuntutan-tuntutan.

Hendaklah kaum itu mengambil teladan akan utusan kerajaan Islam Afghanistan, yang tatkala ia ditanyai oleh suatu surat khabar Marxis telah menerangkan, bahwa, walaupun beliau bukan seorang Marxis beliau mengaku menjadi “sahabat yang sesungguhnya” dari kaum Marxis, oleh karena beliau adalah suatu musuh yang haibat dari kapitalisme Eropah di Asia!

Sayang, sayangnya jikalau pergerakan Islam di Indonesia-kita ini bermusuhan dengan pergerakan Marxis itu! Belum pernahlah di Indonesia-kita ini ada pergerakan, yang sesungguhnya merupakan pergerakan rakyat, sebagai pergerakan Islam dan pergerakan Marxis itu! Belum pernahlah di negeri-kita ini ada pergerakan yang begitu menggetar sampai ke dalam urat-sungsumnya rakyat, sebagai pergerakan yang dua itu! Alangkah haibatnya jikalau dua pergerakan ini, dengan mana rakyat itu tidur dan dengan mana rakyat itu bangun, bersatu menjadi satu banjir yang sekuasa-kuasanya!

Bahagiaulah kaum pergerakan-Islam yang insyaf dan mau akan persatuan. Bahagiaulah mereka, oleh karena merekalah yang sesungguhnya menjalankan perintah-perintah agamanya!

Kaum Islam yang tidak mau akan persatuan, dan yang mengira bahwa sikapnya yang demikian itulah sikap yang benar, – wahai, moga-mogalah mereka itu bisa mempertanggungkan sikapnya yang demikian itu di hadapan Tuhannya!

Marxisme!

Mendengar perkataan ini, maka tampak sebagai suatu bayang-bayangan di penglihatan kita gambarnya berduyun-duyun kaum yang mudlarat dari segala bangsa dan negeri, pucat-muka dan kurus-badan, pakaian berkoyak-koyak ; tampak pada angan-angan kita dirinya pembela dan kampiun si mudlarat tahadi, seorang ahli-fikir yang ketetapan hatinya dan keinsyafan akan kebisaannya “mengingatkan kita pada pahlawan-pahlawan dari dongeng-dongeng kuno Germania yang sakti dengan tiada teralahkan itu”, suatu manusia yang “geweldig” (haibat) yang dengan sesungguhnya bernama “grootmeester” (maha guru) pergerakan kaum buruh, yakni: Heinrich Karl Marx.

Dari muda sampai pada wafatnya, manusia yang haibat ini tiada berhenti-hentinya membela dan memberi penerangan pada si miskin, bagaimana mereka

itu sudah menjadi sengsara dan bagaimana mereka itu pasti akan mendapat kemenangan; tiada kesal dan capainya ia berusaha dan bekerja untuk pembelaan itu: duduk di atas kursi, di muka meja-tulisnya, begitulah ia dalam tahun 1883 menghembuskan nafasnya yang penghabisan.

Seolah-olah mendengarlah kita di mana-mana negeri suaranya mendengung sebagai guntur, tatkala ia dalam tahun 1847 menulis seruannya :
“Kaum buruh dari semua negeri, kumpullah menjadi satu!” Dan sesungguhnya! Riwayat-dunia belumlah pernah menceriterakan pendapat dari seorang manusia, yang begitu cepat masuknya dalam keyakinan satu golongan pergaulan-hidup, sebagai pendapatnya kampiun kaum buruh ini. Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi laksaan, ketian, jutaan .. begitulah jumlah pengikutnya bertambah-tambah. Sebab, walaupun teori-teorinya ada sangat sukar dan berat untuk kaum yang pandai dan terang-fikiran, tetapi “amatlah ia gampang dimengerti oleh kaum yang tertindas dan sengsara: kaum melarat pikiran yang berkeluh-kesah itu”.

Berlainan dengan sosialis-sosialis lain, yang mengira bahwa cita-cita mereka itu dapat tercapai dengan jalan persahabatan antara buruh dan majikan, berlainan dengan umpamanya: Ferdinand Lassalle, yang teriaknya itu ada suatu teriak-perdamaian, maka Karl Marx, yang dalam tulisan-tulisannya tidak satu kali mempersoalkan kata asih atau kata cinta, membeberkan pula faham pertentangan golongan; faham *klassenstrijd*, dan mengajarkan pula, bahwa lepasnya kaum buruh dari nasibnya itu, yalah oleh perlawanan-zonder-damai terhadap pada kaum “bursuasi”, satu perlawanan yang tidak boleh tidak, musti terjadi oleh karena peraturan yang kapitalistis itu adanya.

Walaupun pembaca tentunya semua sudah sedikit-sedikit mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Karl Marx itu, maka berguna pulalah agaknya, jikalau kita di sini mengingatkan, bahwa jasanya ahli-fikir ini yalah:- ia mengadakan suatu pelajaran gerakan fikiran yang bersandar pada perbendaan (*Materialistische Dialectiek*) ; – ia membentangkan teori, bahwa harganya barang-barang itu ditentukan oleh banyaknya “kerja” untuk membikin barang-barang itu, sehingga “kerja” ini yalah “*wertbildende Substanz*”, dari barang-barang itu (*arbeids-*

waardeleer); – ia membeberkan teori, bahwa hasil pekerjaan kaum buruh dalam pembikinan barang itu adalah lebih besar harganya daripada yang ia terima sebagai upah (meerwaarde); – ia mengadakan suatu pelajaran riwayat yang berdasar peri-kebendaan, yang mengajarkan, bahwa “bukan budi-akal manusialah yang menentukan keadaannya, tetapi sebaliknya keadaannya berhubung dengan pergaulan-hiduplah yang menentukan budi-akalnya” (materialistische geschiedenis-opvatting) ; – ia mengadakan teori, bahwa oleh karena “meerwaarde” itu dijadikan kapital pula, maka kapital itu makin lama makin menjadi besar (kapitaals-accumulatie), sedang kapital-kapital yang kecil sama mempersatukan diri jadi modal yang besar (kapitaals-centralisatie), dan bahwa, oleh karena persaingan, perusahaan-perusahaan yang kecil sama mati terdesak oleh perusahaan-perusahaan yang besar, sehingga oleh desak-desakan ini akhirnya cuma tinggal beberapa perusahaan sahaja yang amat besarnya (kapitaals-concentratie); – dan ia mendirikan teori, yang dalam aturan kemodalan ini nasibnya kaum buruh makin lama makin tak menyenangkan dan menimbulkan dendam hati yang makin lama makin sangat (Verelendungs-theorie); – teori-teori mana, berhubung dengan kekurangan tempat, kita tidak bisa menerangkan lebih lanjut pada pembaca-pembaca yang belum begitu mengetahuinya.

Meskipun musuh-musuhnya, di antara mana kaum anarchis, sama menyangkal jasa-jasanya Marx yang kita sebutkan di atas ini, meskipun lebih dulu, dalam tahun 1825, Adolphe Blanqui dengan cara historis-materialistis sudah mengatakan, bahwa riwayat itu “menetapkan kejadian-kejadiannya” sedang ilmu ekonomi “menerangkan sebab-apa kejadian-kejadian itu terjadi”; meskipun teori meerwaarde itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli-ahli-fikir sebagai Sismondi, Thompson dan lain-lain; meskipun pula teori konsentrasi-modal atau arbeidswaardeleer itu ada bagian-bagiannya yang tak bisa mempertahankan diri terhadap kritik musuhnya yang tak jemu-jemu mencari-cari salahnya; – meskipun begitu, maka tetaplah, bahwa stelselnya Karl Marx itu mempunyai pengertian yang tidak kecil dalam sifatnya umum, dan mempunyai pengertian yang penting dalam sifat bagian-bagiannya. Tetaplah pula, bahwa, walaupun teori-teori itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli fikir lain, dirinya Marxlah, yang meski

“bahasa”nya itu untuk kaum “atasan” sangat berat dan sukarnya, dengan terang-benderang menguraikan teori-teori itu bagi kaum “tertindas dan sengsara yang melarat-fikiran” itu dengan pahlawan-pahlawannya, sehingga mengerti dengan terang-benderang. Dengan gampang sahaja, sebagai suatu soal yang “sudah-mustinya-begitu”, mereka lalu mengerti teorinya atas *meerwaarde*, lalu mengerti, bahwa si majikan itu lekas menjadi kaya oleh karena ia tidak memberikan semua hasil-pekerjaan padanya; mereka lalu sahaja mengerti, bahwa keadaan dan susunan ekonomilah yang menetapkan keadaan manusia tentang budi, akal, agama, dan lain-lainnya, – bahwa manusia itu: *e r i s t w a s e r i s t*; mereka lantas sahaja mengerti, bahwa kapitalisme itu akhirnya pastilah binasa, pastilah lenyap diganti oleh susunan pergaulan-hidup yang lebih adil, – bahwa kaum “burjuasi” itu “teristimewa mengadakan tukang-tukang penggali liang kuburnya”.

Begitulah teori-teori yang dalam dan berat itu masuk tulang-sungsumnya kaum buruh di Eropah, masuk pula tulang sungsumnya kaum buruh di Amerika. Dan “tidakkah sebagai suatu hal yang ajaib, bahwa kepercayaan ini telah masuk dalam berjuta-juta hati dan tiada suatu kekuasaan juapun di muka bumi ini yang dapat mencabut lagi dari padanya”. Sebagai tebaran benih yang ditiup angin ke mana-mana tempat, dan tumbuh pula di mana-mana ia jatuh, maka benih Marxisme ini berakar dan bersulur; di mana-mana pula, maka kaum “bursuasi” sama menyiapkan diri dan berusaha membasmi tumbuh-tumbuhan “bahaya proletar” yang makin lama makin subur itu. Benih yang ditebar-tebarkan di Eropah itu, sebagian telah diterbangkan oleh tofan-zaman ke arah khatulistiwa, terus ke Timur, hingga jatuh dan tumbuh di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang tersebar di segenap kepulauan “sabuk-zamrud”, yang bernama Indonesia. Dengungnya nyanyian “Internasionale”, yang dari sehari-ke-sehari menggetarkan udara Barat, sampai-kuatlah haibatnya bergaung dan berkumandang di udara Timur.

Pergerakan Marxistis di Indonesia ini, ingkarlah sifatnya kepada pergerakan yang berhaluan Nasionalistis, ingkarlah kepada pergerakan yang berazas ke-Islaman. Malah beberapa tahun yang lalu, keingkaran ini sudah

menjadi suatu pertengkaran perselisihan faham dan pertengkaran sikap, menjadi suatu pertengkaran saudara, yang, – sebagai yang sudah kita terangkan di muka, – menyuramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengutamakan perdamaian, menyuramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengerti, bahwa dalam pertengkaran yang demikian itulah letaknya kekalahan kita. Kuburkanlah nasionalisme, kuburkanlah politik cinta tanah-air, dan lenyapkanlah politik-keagamaan, – begitulah seakan-akan lagu-perjuangan yang kita dengar. Sebab katanya: Bukankah Marx dan Engels telah mengatakan, bahwa “kaum buruh itu tak mempunyai tanah-air”? Katanya: Bukankah dalam “Manifes Komunis” ada tertulis, bahwa “komunisme itu melepaskan agama”? Katanya: Bukankah Babel telah mengatakan, bahwa “bukan-lah Allah yang membikin manusia, tetapi manusialah yang membikin-bikin Tuhan”?

Dan sebaliknya! Fihak Nasionalis dan Islamis tak berhenti-henti pula mencaci-maki fihak Marxis, mencaci-maki pergerakan yang “bersekutuan” dengan orang asing itu, dan mencaci-maki pergerakan yang “mungkir” akan Tuhan. Mencaci pergerakan yang mengambil teladan akan negeri Rusia yang menurut pendapatnya: azasnya sudah palit dan terbukti tak dapat melaksanakan cita-citanya yang memang suatu utopi, bahkan mendatangkan “kalang-kabutnya negeri” dan bahaya-kelaparan dan hawar-penyakit yang mengorbankan nyawa kurang-lebih limabelas juta manusia, suatu jumlah yang lebih besar daripada jumlahnya sekalian manusia yang binasa dalam peperangan besar yang akhir itu.

Demikianlah dengan bertambahnya tuduh-menuduh atas dirinya masing-masing pemimpin, duduknya perselisihan beberapa tahun yang lalu: satu sama lain sudah s a l a h mengerti dan saling tidak mengindahkan.

Sebab taktik Marxisme yang baru, tidaklah menolak pekerjaan bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia. Taktik Marxisme yang baru, malahan menyokong pergerakan-pergerakan Nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh. Marxis yang masih sahaja bermusuhan dengan pergerakan-pergerakan Nasionalis dan Islamis yang keras di Asia, Marxis yang demikian itu tak mengikuti aliran zaman, dan tak mengerti akan taktik Marxisme yang sudah berubah.

Sebaliknya, Nasionalis dan Islamis yang menunjuk-nunjuk akan “faillietnya” Marxisme itu, dan yang menunjuk-nunjuk akan bencana kekalang-kabutan dan bencana-kelaparan yang telah terjadi oleh “practijknya” faham Marxisme itu, – mereka menunjukkan tak mengertinya atas faham Marxisme, dan tak mengertinya atas sebab terpelesetnya “practijknya” tahadi. Sebab tidakkah Marxisme sendiri mengajarkan, bahwa sosialismenya itu hanya bisa tercapai dengan sungguh-sungguh bilamana negeri-negeri yang besar-besar itu semuanya di-“sosialis”-kan?

Bukankah “kejadian” sekarang ini jauh berlainan daripada “voorwaarde” (syarat) untuk terkabulnya maksud Marxisme itu?

Untuk adilnya kita punya hukuman terhadap pada “practijknya” faham Marxisme itu, maka haruslah kita ingat, bahwa “failliet” dan “kalang-kabut” – nya negeri Rusia adalah dipercepat pula oleh penutupan atau blokkade oleh semua negeri-negeri musuhnya; dipercepat pula oleh hantaman dan serangan pada empatbelas tempat oleh musuh-musuhnya sebagai Inggeris, Perancis, dan jenderal-jenderal Koltchak, Denikin, Yudenitch dan Wrangel; dipercepat pula oleh anti-propaganda yang dilakukan oleh hampir semua surat-khabar di seluruh dunia.

Di dalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnya itu pula harus ikut bertanggungjawab atas matinya limabelas juta orang yang sakit dan kelaparan itu, di mana mereka menyokong penyerangan Koltchak, Denikin, Yudenitch dan Wrangel itu dengan harta dan benda; di mana umpamanya negeri Inggeris, yang membuang-buang berjuta-juta rupiah untuk menyokong penyerangan-penyerangan atas diri sahabatnya yang dulu itu, telah “mengotorkan nama Inggeris di dunia dengan menolak memberi tiap-tiap bantuan pada kerja-penolongannya” si sakit dan si lapar itu; di mana di Amerika, di Rumania, dan di Hongaria pada saat terjadinya bencana itu pula, karena terlalu banyaknya gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk kayu-bakar, sedang di negeri Rusia orang-orang di distrik Samara makan daging anak-anaknya sendiri oleh karena laparnya.

Bahwa sesungguhnya, luhurlah sikapnya H. G. Wells, penulis Inggris yang masyhur itu, seorang yang bukan Komunis, di mana ia dengan tak memihak pada siapa juga, menulis, bahwa, umpamanya kaum bolshevik itu “tidak dirintang-rintangi mereka barangkali bisa menyelesaikan suatu experiment (percobaan) yang maha-besar faedahnya bagi peri-kemanusiaan ... Tetapi mereka dirintang-rintangi”.

Kita yang bukan komunis pula, kitapun tak memihak pada siapa juga! Kita hanyalah memihak kepada Persatuan-persatuan-Indonesia, kepada persahabatan pergerakan kita semua!

Kita di atas menulis, bahwa taktik Marxisme yang sekarang adalah berlainan dengan taktik Marxisme yang dulu. Taktik Marxisme, yang dulu sikapnya begitu sengit anti-kaum-kebangsaan dan anti-kaum-keagamaan, maka sekarang, terutama di Asia, sudahlah begitu berubah, hingga kesengitan “anti” ini sudah berbalik menjadi persahabatan dan penyokongan. Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis di negeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afghanistan.

Adapun teori Marxisme sudah berubah pula. Memang seharusnya begitu! Marx dan Engels bukanlah nabi-nabi, yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa terpakai untuk segala zaman. Teori-teorinya haruslah diubah, kalau zaman itu berubah; teori-teorinya haruslah diikutkan pada perubahannya dunia, kalau tidak mau menjadi bangkrut. Marx dan Engels sendiripun mengerti akan hal ini; mereka sendiripun dalam tulisan-tulisannya sering menunjukkan perubahan faham atau perubahan tentang kejadian-kejadian pada zaman mereka masih hidup. Bandingkanlah pendapat-pendapatnya sampai tahun 1847; bandingkanlah pendapatnya tentang arti “Verelendung” sebagai yang dimaksudkan dalam “Manifes Komunis” dengan pendapat tentang arti perkataan itu dalam “Das Kapital”, maka segeralah tampak pada kita perubahan faham atau perubahan perindahan itu. Bahwasanya: benarlah pendapat sosial demokrat Emile Vandervelde, di mana ia mengatakan, bahwa “revisionisme itu tidak mulai dengan Bernstein, akan tetapi dengan Marx dan Engels adanya”.

Perubahan taktik dan perubahan teori itulah yang menjadi sebab, maka kaum Marxis yang “muda” baik “sabar” maupun yang “keras”, terutama di Asia, sama menyokong pergerakan nasional yang sungguh-sungguh. Mereka mengerti, bahwa di negeri-negeri Asia, di mana belum ada kaum proletar dalam arti sebagai di Eropah atau Amerika itu, pergerakannya harus diubah sifatnya menurut pergaulan-hidup di Asia itu pula. Mereka mengerti, bahwa pergerakan Marxistis di Asia haruslah berlainan taktik dengan pergerakan Marxis di Eropah atau Asia, dan haruslah “bekerja bersama-sama dengan partai-partai yang “klein-burgerlijk”, oleh karena di sini yang pertama-tama perlu bukan kekuasaan tetapi yalah perlawanan terhadap pada feodalisme”.

Supaya kaum buruh di negeri-negeri Asia dengan leluasa bisa menjalankan pergerakan yang sosialis sesungguh-sungguhnya, maka perlu sekali negeri-negeri itu m e r d e k a, perlu sekali kaum itu mempunyai nationale autonomie (otonomi nasional). “Nationale autonomie adalah suatu tujuan yang harus dituju oleh perjuangan proletar, oleh karena ia ada suatu upaya yang perlu sekali bagi politiknya”, begitulah Otto Bauer berkata. Itulah sebabnya, maka otonomi nasional ini menjadi suatu hal yang pertama-tama harus diusahakan oleh pergerakan-pergerakan buruh di Asia itu. Itulah sebabnya, maka kaum buruh di Asia itu wajib bekerja bersama-sama dan menyokong segala pergerakan yang merebut otonomi nasional itu j u g a, dengan tidak menghitung-hitung, azas apakah pergerakan-pergerakan itu mempunyainya. Itulah sebabnya, maka pergerakan Marxisme di Indonesia ini harus pula menyokong pergerakan-pergerakan kita yang Nasionalistis dan Islamistis yang mengambil otonomi itu sebagai maksudnya pula.

Kaum Marxis harus ingat, bahwa pergerakannya itu, tak boleh tidak, pastilah menumbuhkan rasa Nasionalisme di hati-sanubari kaum buruh Indonesia, oleh karena modal di Indonesia itu kebanyakannya yalah modal asing, dan oleh karena budi perlawanan itu menumbuhkan suatu rasa tak senang dalam sanubari kaum-buruhnya rakyat di-“bawah” terhadap pada rakyat yang di-“atas”-nya, dan menumbuhkan suatu keinginan pada nationale machts-politiek dari rakyat sendiri. Mereka harus ingat, bahwa rasa-internasionalisme itu di Indonesia niscaya

tidak begitu tebal sebagai di Eropah, oleh karena kaum buruh di Indonesia ini menerima faham internasionalisme itu pertama-tama yalah sebagai taktik, dan oleh karena bangsa Indonesia itu oleh “gehechtheid” pada negerinya, dan pula oleh kekurangan bekal, belum banyak yang nekat meninggalkan Indonesia, untuk mencari kerja di lain-lain negeri, dengan iktikad: “ubi bene, ibi patria: di mana aturan-kerja bagus, di situlah tanah-air saya”, – sebagai kaum buruh di Eropah yang menjadi tidak tetap-rumah dan tidak tetap tanah-air oleh karenanya.

Dan jikalau ingat akan hal-hal ini semuanya, maka mereka niscaya ingat pula akan salahnya memerangi pergerakan bangsanya yang nasionalistis adanya. Niscaya mereka ingat pula akan teladan-teladan pemimpin-pemimpin Marxis di lain-lain negeri, yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum-kaum nasionalis atau kebangsaan. Niscaya mereka ingat pula akan teladan pemimpin-pemimpin Marxis di negeri Tiongkok, yang dengan ridla hati sama menyokong usahanya kaum Nasionalis, oleh sebab mereka insyaf bahwa negeri Tiongkok itu pertama-tama butuh persatuan nasional dan kemerdekaan nasional adanya.

Demikian pula, tak pantaslah kaum Marxis itu bermusuhan dan berbenturan dengan pergerakan Islam yang sungguh-sungguh. Tak pantas mereka memerangi pergerakan, yang, sebagaimana sudah kita uraikan di atas, dengan seterang-terangnya bersikap anti-kapitalisme; tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan sikapnya anti-riba dan anti-bunga dengan seterang-terangnya yalah anti-meerwaarde pula; dan tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan seterang-terangnya mengejar kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, dengan seterang-terangyya mengejar nationale autonomie. Tak pantas mereka bersikap demikian itu, oleh karena taktik Marxisme-baru terhadap agama adalah berlainan dengan taktik Marxisme-dulu. Marxisme-baru adalah berlainan dengan Marxisme dari tahun 1847, yang dalam “Manifes Komunis” mengatakan, bahwa agama itu harus di-“abschaffen” atau dilepaskan adanya.

Kita harus membedakan Historis-Materialisme itu daripada Wijsgerig-Materialisme; kita harus memperingatkan, bahwa maksudnya Historis-Materialisme itu berlainan dari pada maksudnya Wijsgerig-Materialisme tahadi.

Wijsgerig-Materialisme memberi jawaban atas pertanyaan: bagaimanakah hubungannya antara fikiran (denken) dengan benda (materie), bagaimanakah fikiran itu terjadi, sedang Historis-Materialisme memberi jawaban atas soal: sebab apakah fikiran itu dalam suatu zaman ada begitu atau begini; wijsgerig-materialisme menanyakan adanya (wezen) fikiran itu; historis-materialisme menanyakan sebab-sebabnya fikiran itu b e r o b a h ; wijsgerig-materialisme mencari asalnya fikiran, historis materialisme mempelajari tumbuhnya fikiran; wijsgerig materialisme adalah wijsgerig, historis materialisme adalah historis.

Dua faham ini oleh musuh-musuhnya Marxisme di Eropah, terutama kaum gereja, senantiasa ditukar-tukarkan, dan senantiasa dikelirukan satu sama lain. Dalam propagandanya anti-Marxisme mereka tak berhenti-henti mengusahakan kekeliruan faham itu; tak berhenti-henti mereka menuduh-nuduh, bahwa kaum Marxisme itu yalah kaum yang mempelajarkan, bahwa fikiran itu hanyalah suatu pengeluaran sahaja dari otak, sebagai ludah dari mulut dan sebagai empedu dari limpa; tak berhenti-henti mereka menamakan kaum Marxis suatu kaum yang menyembah benda, suatu kaum yang bertuhankan materi.

Itulah asalnya kebencian kaum Marxis Eropah terhadap kaum gereja, asalnya sikap perlawanan kaum Marxis Eropah terhadap kaum agama. Dan perlawanan ini bertambah sengitnya, bertambah kebenciannya, di mana kaum gereja itu memakai-makai agamanya untuk melindungi-lindungi kapitalisme, memakai-makai agamanya untuk membela keperluan kaum atasan, memakai-makai agamanya untuk menjalankan politik yang reaksioner sekali.

Adapun kebencian pada kaum agama yang timbulnya dari sikap kaum gereja yang reaksioner itu, sudah dijatuhkan pula oleh kaum Marxis kepada kaum agama Islam, yang berlainan sekali sikapnya dan berlainan sekali sifatnya dengan kaum gereja di Eropah itu. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang tak merdeka; di sini agama Islam adalah agama kaum yang di-“bawah”. Sedang kaum yang memeluk agama Kristen adalah kaum yang bebas; di sana agama Kristen adalah agama kaum yang di-“atas”. Tak boleh tidak, suatu agama yang anti-kapitalisme, agama kaum yang tak merdeka, agama kaum yang di-“bawah” ini; agama yang menyuruh mencari kebebasan, agama yang melarang menjadi kaum

“bawahan”, – agama yang demikian itu pastilah menimbulkan sikap yang tidak reaksioner, dan pastilah menimbulkan suatu perjuangan yang dalam beberapa bagian sesuai dengan perjuangan Marxisme itu.

Karenanya, jikalau kaum Marxisme ingat akan perbedaan kaum gereja di Eropah dengan kaum Islam di Indonesia ini, maka niscaya mereka mengajukan tangannya, sambil berkata: saudara, marilah kita bersatu. Jikalau mereka menghargai akan contoh-contoh saudara-saudaranya seazas yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum Islam, sebagai yang terjadi di lain-lain negeri, maka niscayalah mereka mengikuti contoh-contoh itu pula. Dan jikalau mereka dalam pada itu juga bekerja bersama-sama dengan kaum Nasionalis atau kaum kebangsaan, maka mereka dengan tenteram-hati boleh berkata: kewajiban kita sudah kita penuhi.

Dan dengan memenuhi segala kewajiban Marxis-muda tahadi itu, dengan memperhatikan segala perubahan teori azasnya, dengan menjalankan segala perubahan taktik pergerakannya itu, mereka boleh menyebutkan diri pembela rakyat yang tulus-hati, mereka boleh menyebutkan diri garamnya rakyat.

Tetapi Marxis yang ingkar akan persatuan, Marxis yang kolot-teori dan kuno-taktiknya, Marxis yang memusuhi pergerakan kita Nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh, – Marxis yang demikian itu janganlah merasa terlanggar kehormatannya jikalau dinamakan racun rakyat adanya!

Tulisan kita hampir habis.

Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan, bahwa faham Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita yakin, bahwa kita dengan terang-benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insyaf, bahwa Persatuanlah yang membawa kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan. Dan kita yakin pula, bahwa, walaupun fikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing fihak, ia menunjukkan bahwa Persatuan itu bisa tercapai. Sekarang tinggal menetapkan sahaja organisasinya, bagaimana Persatuan

itu bisa berdiri; tinggal mencari organisatornya sahaja, yang menjadi Mahatma Persatuan itu. Apakah Ibu-Indonesia, yang mempunyai Putera-putera sebagai Oemar Said Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo dan Semaun, – apakah Ibu-Indonesia itu tak mempunyai pula Putera yang bisa menjadi Kampiun Persatuan itu?

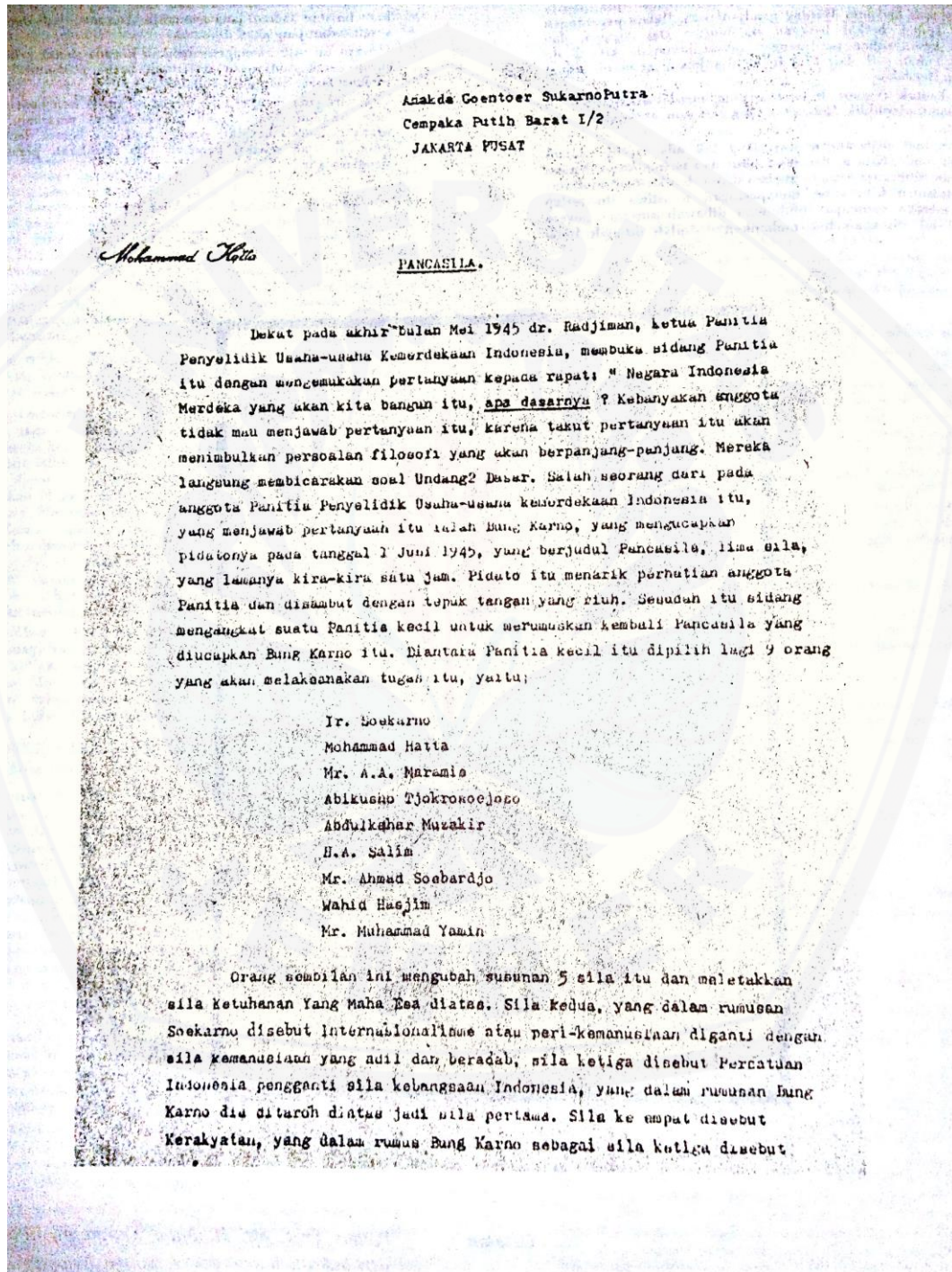
Kita harus bisa menerima; tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya Persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi, kalau masing-masing fihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula.

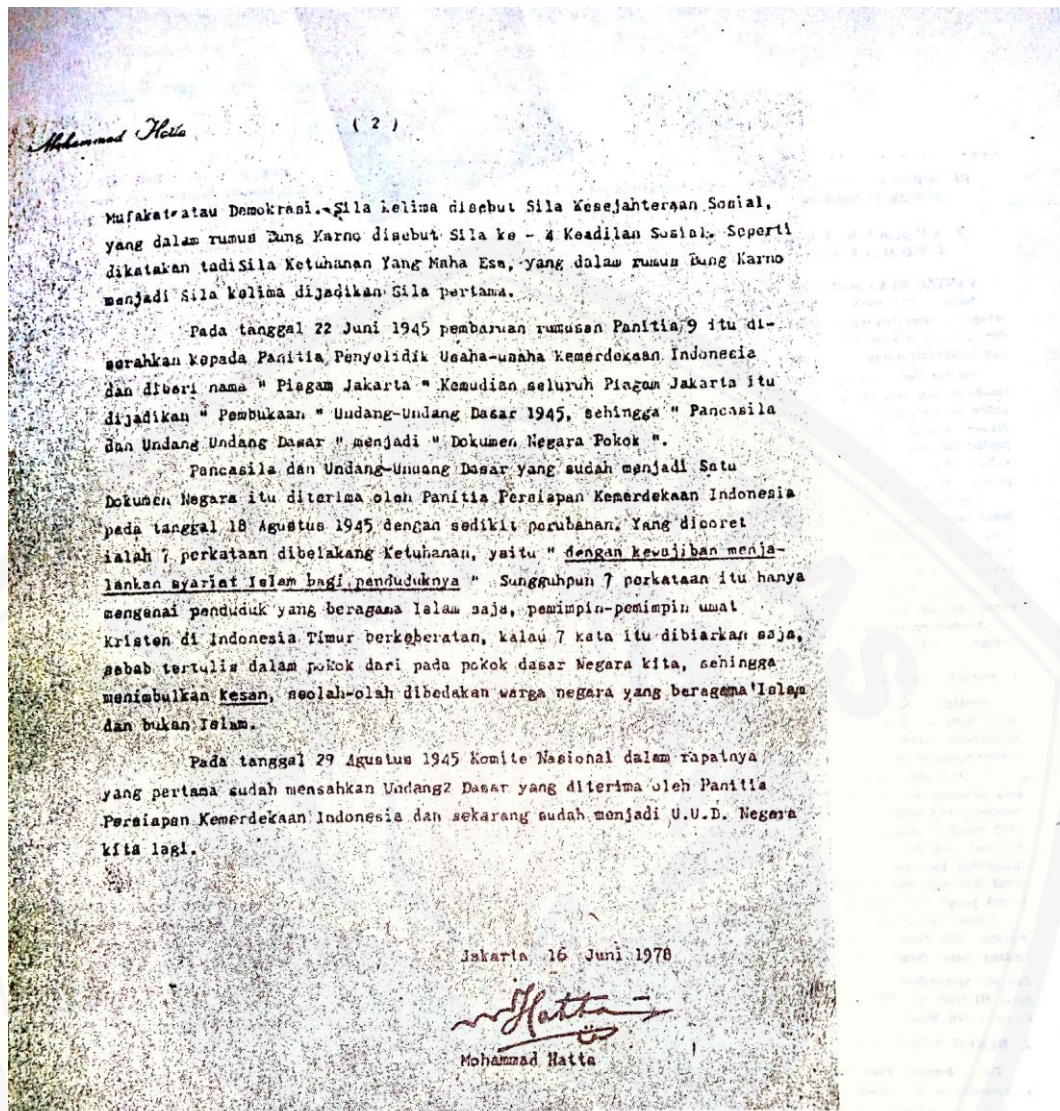
Dan jikalau kita semua insyaf, bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi; jikalau kita semua insyaf, bahwa dalam perceraian-beraian itu letaknya benih perbudakan kita; jikalau kita semua insyaf, bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya “via dolorosa” ; jikalau kita insyaf, bahwa Rokh Rakyat Kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju Sinar yang Satu yang berada ditengah-tengah kegelapan-gumpita yang mengelilingi kita ini, – maka pastilah Persatuan itu terjadi, dan pastilah Sinar itu tercapai juga.

Sebab Sinar itu dekat!

Sumber: Soekarno. 1966. Pantja Azimat Revolusi. Surabaya: Grip, hal. 9-31.

LAMPIRAN E. SURAT WASIAT MOHAMMAD HATTA KEPADA
GUNTUR SOEKARNOPUTRA





- Catatan :
- Surat Wasiat Bung Hatta ini di-reproduksi 1 X 1 dari Hr. Sinar Harapan tanggal 15 Maret 1980.
 - Lay-out dalam penerbitan ini oleh PT. Inti Idayu Press.
 - Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Surat Wasiat Bung Hatta ini silahkan baca juga :
 1. Keterangan Guntur Sukarnoputra dalam Hr. Sinar Harapan tanggal 15 Maret 1980. Hal. I dan XII.
 2. Buku MOHAMMAD HATTA, Memoir. Penerbit Tintamas, Jakarta, 1979. Halaman 434 dan 436.

Sumber: Yayasan Idayu. 1981. Sekitar Tanggal dan Penggalinya: Guntingan Pers dan Bibliografi tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Idayu, hal. 208-209.

**LAMPIRAN F. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR
PANCASILA****SALINAN**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
HARI LAHIR PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
 - c. bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945;
 - d. bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;
- f. bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA.

PERTAMA : Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

KEDUA : Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

KETIGA : Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

KEEMPAT: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti

Sumber: https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Keppres_Nomor_24_Tahun_2016.pdf (diakses pada 1 November 2018)